JURNAL KEHUMASAN

DINAMIKA PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
TAHUN 2025



















Jurnal Kehumasan 2025

Penanggung Jawab

Setya Utama

Pengarah

Eddy Cahyono Sugiarto

Pimpinan Redaksi

Faisal Fahmi

Redaktur dan Kontributor

Sari Ratna Nilam
R. Efa Febryana
Akhmad Firmannamal
Mulyaningsih
Oky Tri Handoko
Khairunnissa
Dwi Ayu Riani
Muhammad Daris Alwan Tama
Salsabila Zaliana Arifin

Desain Grafis

Wulan Nawangsari
Didi Fauzi

Sekretariat

Anugrah Syafieq Fahlevi

Kontak Redaksi

Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian Sekretariat Negara
Jl. Veteran No.17-18
Jakarta Pusat 10110
Telp./Fax.: (021) 384906
Email: humas@setneg.go.id

www.setneg.go.id @kemensetneg.ri @KemensetnegRI Kementerian Sekretariat Negara RI



Daftar Isi

3

Profil Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia

9

Implementasi Keterbukaan Informasi Publik

15

Kerjasama Hubungan Masyarakat Dalam Mendukung Implementasi Keterbukaan Informasi Publik

49

Survei Kepuasan Penerimaan Kunjungan Masyarakat

59

Diseminasi Informasi

73

Penanganan Aksi Unjuk Rasa

79

Monitoring & Analisis Media

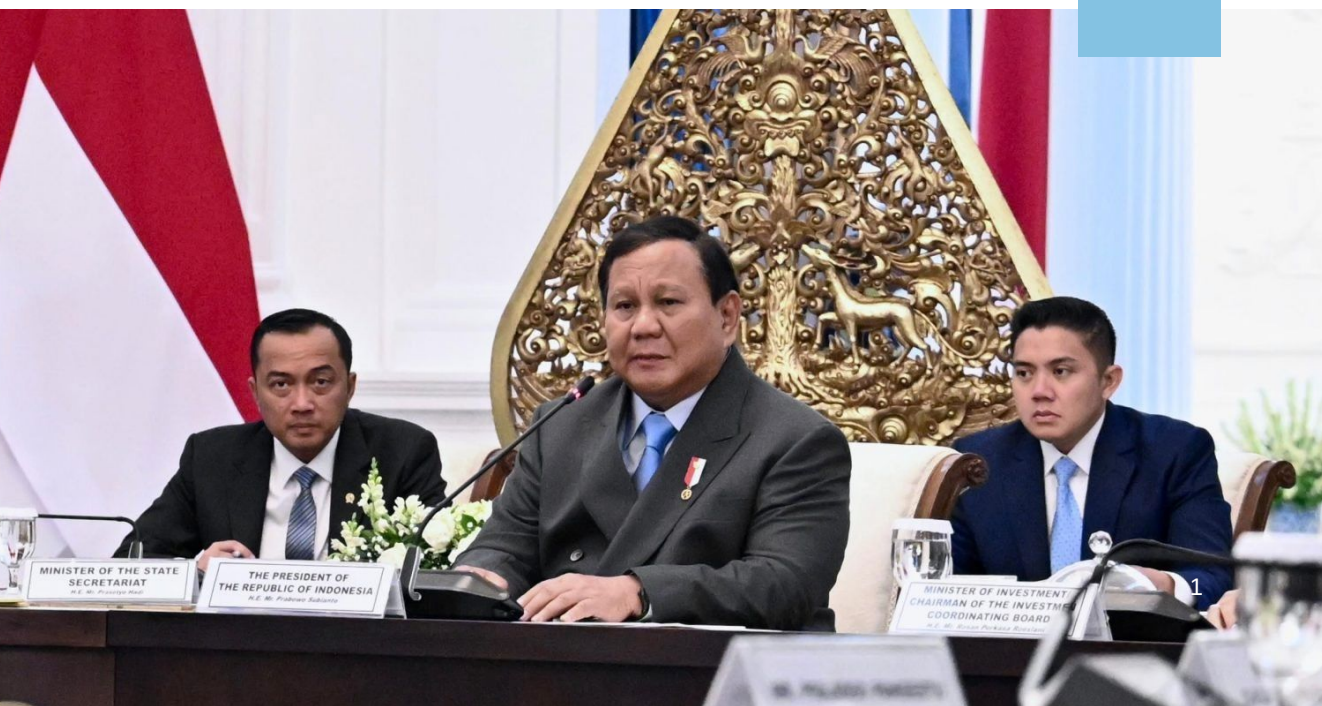
91

Penghargaan

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang berdiri dengan menjadikan demokrasi sebagai pijakan utama dalam mewujudkan negara yang aman, tentram, nyaman, adil, dan sejahtera. Demokrasi menempatkan kepentingan umum atau rakyat pada posisi prioritas dan utama daripada kepentingan pemerintah, golongan, suku, dan ras. Hal ini juga yang membuat setiap aturan perundang-undangan yang dibuat perlu diketahui oleh rakyat untuk mendapatkan tanggapan sebagai bentuk kolaborasi yang baik dalam hal berbangsa dan bernegara. Untuk inilah, keterbukaan informasi publik hadir sebagai upaya memberikan hak atas informasi bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Selain itu, hak atas informasi menjadi langkah pemerintah dalam menjaga ketertiban masyarakat dan memelihara hak-hak dasar manusia sehingga kehidupan dapat berjalan dengan kemajuan dan peningkatan yang bermuara pada terwujudnya cita-cita besar para pendiri bangsa.

Konstitusi menjamin hak semua warga negara untuk mengakses informasi dan menyampaikan aspirasi. Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan landasan yang kuat bagi komunikasi yang terbuka dan aktif antara pemerintah dan masyarakat. Persyaratan ini tidak hanya menjadi acuan normatif, tetapi juga pedoman operasional bagi semua program dan kegiatan hubungan masyarakat yang kami laksanakan. Penyediaan informasi yang benar, tersedia, dan akuntabel selalu menjadi bagian dari agenda di tengah arus informasi yang cepat dan dinamis di masyarakat.

Kementerian Sekretariat Negara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didasarkan pada Peraturan Menteri Sekretariat Negara Nomor 11 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara. Melalui peraturan ini, peran Kementerian Sekretariat Negara menjadi lebih signifikan dalam memberikan dukungan teknis, administratif, dan analitis di bidang sekretariat negara, pengelolaan komunikasi publik presiden, pencatatan urusan negara, serta pengorganisasian hubungan antarlembaga. Kami juga berupaya melaksanakan semua mandat secara profesional dan akuntabel dengan landasan hukum yang jelas.





Pada tahun 2025, sejumlah agenda strategis nasional dan internasional telah diluncurkan. Ini termasuk dukungan komunikasi untuk program prioritas pemerintahan baru, kerja sama internasional, hingga penanganan aspirasi publik yang masih berlangsung melalui berbagai saluran komunikasi. Dinamika penyampaian pendapat di muka umum juga menjadi isu tersendiri mengingat tahun ini merupakan tahun konsolidasi awal pemerintahan baru. 441 aksi masyarakat yang terjadi di kawasan Istana Kepresidenan pada tahun 2025 memberikan banyak pelajaran terkait peningkatan kualitas pengelolaan aspirasi secara meyakinkan dan humanis tanpa mengorbankan keamanan dan ketertiban.

Kami juga terus meningkatkan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan seperti akademisi, media massa, kelompok masyarakat, dan generasi muda. Ada berbagai program, seperti diskusi publik, kunjungan delegasi, pemanfaatan platform digital, dan forum interaktif lainnya, yang membantu memperluas jangkauan informasi sekaligus menerima umpan balik dari masyarakat. Menurut kami, metode kemitraan ini dapat mengembangkan ekosistem komunikasi yang lebih sehat, di mana warga tidak hanya menjadi penerima informasi tetapi juga sebagai mitra komunikasi.

Penyusunan Jurnal Hubungan Masyarakat ini akan berfungsi sebagai pertanggungjawaban dan dokumentasi atas semua program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Jurnal ini mencatat keberhasilan, tantangan, hal-hal yang dipelajari, serta inovasi yang dilakukan dalam pengelolaan komunikasi publik di Kementerian Sekretariat Negara. Oleh karena itu, kami berharap dokumentasi ini dapat menjadi bahan refleksi untuk peningkatan lebih lanjut serta memberikan gambaran yang lengkap tentang dinamika PR di organisasi kami.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu dalam semua aspek komunikasi kami kepada masyarakat umum. Kami yakin bahwa hasil positif dari pekerjaan kami akan segera dirasakan oleh masyarakat dan akan mengarah pada tercapainya tata kelola yang lebih baik, lebih terbuka, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

BAB I

PROFIL KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA



PROFIL KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA



> *Peran media mainstream menjadi semakin krusial sebagai rujukan. Jadi ketika misalnya saya membayangkan begini: masyarakat melihat konten di media sosial yang kemudian ragu, saya membayangkan salah satu rujukannya adalah 'kita coba lihat nih channel-nya [mainstream media]'*
>
> **Menteri Sekretaris Negara**
> dalam dialog di Apa Kabar Indonesia Pagi (14/02/2026)

Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) Republik Indonesia telah berdiri sejak awal kemerdekaan, tepatnya pada 19 Agustus 1945, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pemerintahan Indonesia. Dipimpin oleh Menteri Sekretaris Negara yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan Wakil Presiden, Kemensetneg memiliki peran strategis dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Presiden dan Wakil Presiden.

Sebagai lembaga yang berada di jantung kekuasaan eksekutif, Kemensetneg menyelenggarakan fungsi dukungan teknis, administratif, dan analisis kebijakan di bidang kesekretariatan negara serta manajemen kabinet. Fungsi ini meliputi pengelolaan komunikasi publik kepresidenan, pengelolaan arsip dan dokumen negara, hubungan kelembagaan dalam dan luar negeri, layanan keprotokolan negara, pelayanan rumah tangga kepresidenan, hingga koordinasi dengan kementerian/lembaga dalam penyusunan agenda kenegaraan. Dalam pelaksanaannya, Kemensetneg juga memberikan telaahan strategis dan rekomendasi kebijakan kepada Presiden dan Wakil Presiden, sehingga menjadi penghubung penting antara kebijakan strategis pemerintah dan pelaksanaannya di lapangan.

Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) kini secara resmi berada di bawah kepemimpinan Prasetyo Hadi sebagai Menteri Sekretaris Negara dalam Kabinet Merah Putih. Beliau didampingi oleh dua Wakil Menteri, yakni Bambang Eko Suhariyanto dan Juri Ardiantoro.

Formasi kepemimpinan ini membawa semangat baru untuk mendorong penguatan fungsi strategis Kemensetneg sebagai institusi yang mendukung pemerintahan secara profesional, transparan, dan efektif.

Dengan struktur organisasi yang solid, dukungan sumber daya manusia yang andal, serta tata kelola yang berorientasi pada hasil, Kemensetneg terus bertransformasi menjadi institusi birokrasi yang profesional, adaptif, dan responsif terhadap tantangan zaman, Kemensetneg diharapkan mampu mengawal visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan penuh integritas dan dedikasi, sekaligus menjadi garda terdepan dalam membangun sinergi antara negara dan rakyat.



Prasetyo Hadi
Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia



Bambang Eko Suhariyanto
Wakil Menteri Sekretaris Negara



Juri Ardiantoro
Wakil Menteri Sekretaris Negara

PROFIL BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA



Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Kemensetneg memiliki peran penting dalam memastikan kelancaran proses komunikasi dan penyampaian informasi publik terkait Presiden, Wakil Presiden, serta Menteri Sekretaris Negara. Sekaligus berperan sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat, dengan tanggung jawab strategis untuk membangun narasi kebijakan yang akurat, inklusif, dan berorientasi pada transparansi.



Berada dalam lingkaran inti kekuasaan eksekutif, Biro Humas Kemensetneg memiliki visi untuk menjadi sumber informasi terpercaya, sekaligus menciptakan iklim informasi yang bebas dari disinformasi dan hoaks, serta mendorong terbentuknya masyarakat yang terinformasi dengan baik (*well-informed society*).

Sebagai bentuk adaptasi terhadap tuntutan komunikasi modern, Biro Humas Kemensetneg terus berinovasi untuk mempercepat dan memperluas akses informasi publik melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi. Layanan informasi berbasis digital, seperti kanal media sosial resmi, portal berita internal, serta produksi konten multimedia yang interaktif dan berbasis data, menjadi bagian dari strategi diseminasi yang menyasar berbagai segmen masyarakat.



Berdasarkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara, Biro Humas berada di bawah koordinasi Sekretariat Kementerian dan memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Koordinasi pengelolaan, pelayanan, dan dokumentasi informasi publik Kementerian;
2. Pelaksanaan analisis, monitoring, dan evaluasi media arus utama dan media sosial terkait kegiatan Presiden, Wakil Presiden, dan Kementerian;
3. Pengelolaan media dan penyebarluasan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Kementerian;
4. Pelaksanaan peliputan dan dokumentasi kegiatan Kementerian;
5. Koordinasi hubungan komunikasi dan kerja sama kehumasan dengan satuan organisasi di lingkungan Kementerian serta kementerian/lembaga/instansi lain dan masyarakat;
6. Pelaksanaan diseminasi informasi kehumasan Kementerian melalui media publikasi berbasis teknologi informasi;
7. Pelaksanaan dukungan administrasi Biro Hubungan Masyarakat; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kementerian.

Sepanjang tahun 2025, Biro Humas Kemensetneg telah menjalankan berbagai program komunikasi publik yang mendukung implementasi program-program prioritas pemerintah, termasuk sosialisasi agenda transformasi digital birokrasi, penguatan layanan publik berbasis data, serta dukungan terhadap penyampaian kebijakan Presiden kepada masyarakat. Kegiatan-kegiatan tersebut diwujudkan dalam bentuk forum diskusi kebijakan, produksi konten, pelatihan literasi media, webinar/FGD, serta penyelenggaraan konferensi pers dan siaran pers resmi secara berkala.

Selain itu, Biro Humas juga aktif dalam mengelola komunikasi publik untuk berbagai peristiwa dan agenda kenegaraan, seperti pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2024–2029, peringatan Hari Lahir Pancasila, Hari Kebangkitan Nasional, serta penyampaian pidato kenegaraan oleh Presiden di hadapan MPR/DPR/DPD, termasuk mempublikasikan kiprah Presiden Republik Indonesia dalam mendukung penyelesaian isu-isu internasional.

Berbagai kegiatan kehumasan yang dijalankan oleh Biro Humas diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam membangun pemerintahan yang tidak hanya transparan dan akuntabel, tetapi juga peka terhadap kebutuhan masyarakat. Seluruh capaian ini akan dikaji lebih lanjut dalam bagian-bagian berikutnya dalam Jurnal Kehumasan Kementerian Sekretariat Negara tahun 2025 ini, sebagai wujud pertanggungjawaban publik dan refleksi atas kinerja komunikasi pemerintah.





BAB II

IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK



DASAR HUKUM

Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penetapan Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia

Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Kemensetneg memiliki peran penting dalam memastikan kelancaran proses komunikasi dan penyampaian informasi publik terkait Presiden, Wakil Presiden, serta Menteri Sekretaris Negara. Sekaligus berperan sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat, dengan tanggung jawab strategis untuk membangun narasi kebijakan yang akurat, inklusif, dan berorientasi pada transparansi.

Seiring dengan perkembangan zaman, dinamika kebijakan, serta penyesuaian struktur organisasi berdasarkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 11 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara, upaya peningkatan kualitas pelayanan informasi publik menjadi semakin penting. Oleh karena itu, pada tahun 2025, proses pemutakhiran Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2012 sebagai dasar pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Kemensetneg telah mulai dilakukan oleh Biro Hubungan Masyarakat Kemensetneg.

Selain itu, dalam rangka mendukung kepemimpinan kenegaraan baru dan sehubungan dengan perubahan Organisasi dan Tata Kerja di Kementerian Sekretariat Negara, Permensesneg dimaksud sedang dalam proses perubahan.

Keputusan Menteri Nomor 112 Tahun 2021 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara

Sebagai upaya meningkatkan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, telah ditetapkan Keputusan Menteri Sekretaris Negara Nomor 112 Tahun 2021 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, yang telah disesuaikan dengan perubahan struktur, kebutuhan organisasi, dan tata kerja kementerian.

Keputusan Sekretaris Kementerian Sekretaris Negara Nomor 95 Tahun 2021 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara

Guna meningkatkan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta seiring dengan perubahan struktur organisasi dan tata kerja Kementerian Sekretariat Negara, telah ditetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Nomor 95 Tahun 2021 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.

Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Pemberian Informasi Publik Kepada Masyarakat yang Berkaitan dengan Kementerian Sekretariat Negara

Kementerian Sekretariat Negara senantiasa mewujudkan bentuk badan publik yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel, bertanggung jawab, serta menghasilkan layanan informasi berkualitas. Untuk itu, Kemensetneg senantiasa bergerak dan melayani masyarakat dalam hal pemberian informasi publik dengan menetapkan Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik Kepada Masyarakat yang berkaitan dengan Kementerian Sekretariat Negara dan 8 (delapan) Standar Operasional Prosedur (SOP):

- SOP Pemberian Informasi Publik kepada masyarakat yang berkaitan dengan Kementerian Sekretariat Negara melalui pengumuman.
- SOP Pemberian Informasi Publik kepada masyarakat yang berkaitan dengan Kementerian Sekretariat Negara melalui penanganan permohonan.
- SOP pengajuan keberatan pelayanan informasi publik yang berkaitan dengan Kementerian Sekretariat Negara.
- SOP Penanganan sengketa informasi yang berkaitan dengan Kementerian Sekretariat Negara melalui adjudikasi dan mediasi. SOP Penyusunan dan Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP).
- SOP pengujian tentang konsekuensi terhadap informasi publik yang berkaitan dengan Kementerian Sekretariat Negara.
- SOP Pendokumentasian informasi publik.
- SOP Pendokumentasian informasi publik yang Dikecualikan.

Maklumat Pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

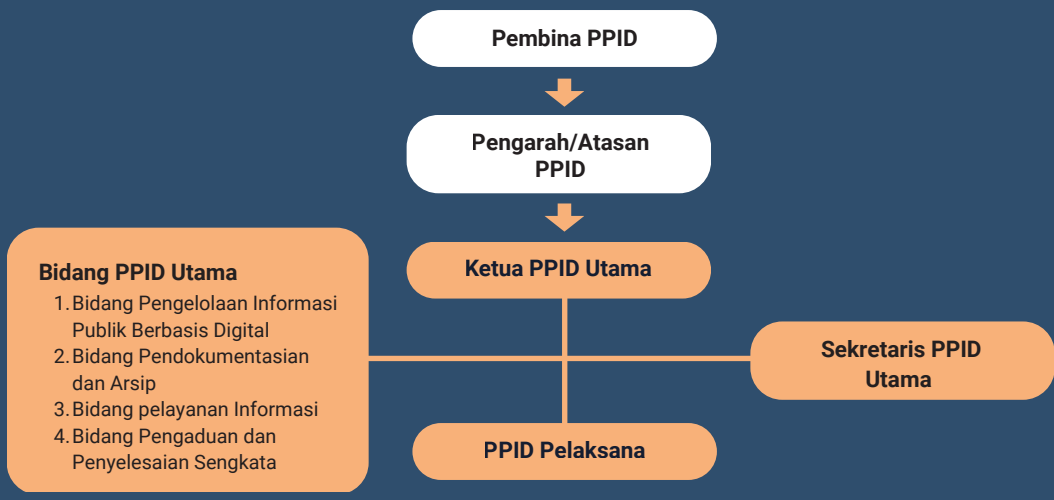
Pelaksana di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara Maklumat pelayanan PPID Kementerian Sekretariat Negara merupakan pernyataan tertulis yang memuat keseluruhan kewajiban dan janji PPID Kementerian Sekretariat Negara yang terdapat dalam standar pelayanan menyangkut pelayanan informasi kepada publik. Sehubungan dengan hal tersebut, PPID Kementerian Sekretariat Negara menyatakan maklumat pelayanan sebagai berikut:

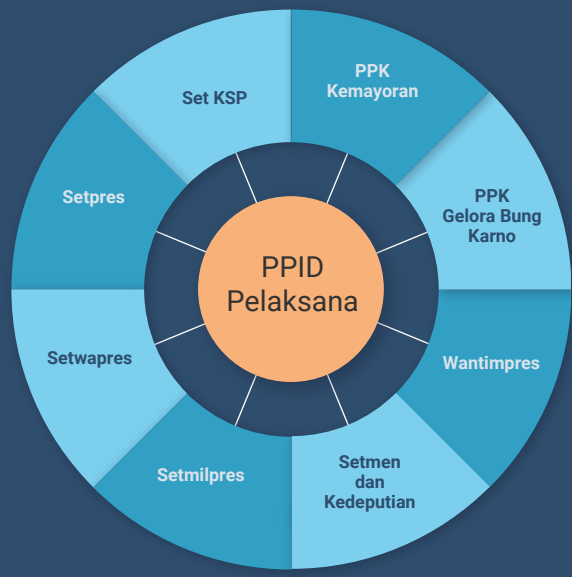
> *"Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik kepada masyarakat yang berkaitan dengan Kementerian Sekretariat Negara secara responsif, akurat, santun, dan akuntabel."*

PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK

Upaya Kementerian Sekretariat Negara untuk mengintegrasikan sistem dan data informasi publik agar layanan yang diberikan menjadi lebih cepat, efektif, dan efisien. Integrasi ini dilakukan melalui pemanfaatan teknologi digital, penyelarasan data antarunit kerja, serta penguatan koordinasi dalam penyediaan informasi.

Struktur Organisasi PPID





- Keputusan Menteri Sekretaris Negara Nomor 112 Tahun 2021 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.
- Keputusan Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara selaku Pengarah/Atasan PPID Kemensetneg Nomor 95 Tahun 2021 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Kemensetneg.

AKSES INFORMASI DAN PELAYANAN PUBLIK

Kementerian Sekretariat Negara berkomitmen untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses informasi dan pelayanan publik, salah satunya melalui penyediaan layanan satu pintu yang terintegrasi melalui berbagai kanal komunikasi, seperti email, situs web resmi, serta media sosial Kemensetneg—termasuk Instagram, Facebook, X (Twitter), YouTube, dan TikTok. Melalui kanal-kanal ini, masyarakat dapat dengan mudah mengetahui prosedur, layanan, maupun informasi aktual terkait kegiatan dan kebijakan yang dijalankan, cukup dengan memindai QR code atau mengakses tautan yang tersedia. Sebagai bagian dari upaya akselerasi komunikasi publik yang inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan generasi digital, Kemensetneg juga terus menghadirkan berbagai inovasi pelayanan serta diseminasi informasi. Beberapa inisiatif yang telah dijalankan antara lain:

- **Setneg Mantul** dan **Setneg Mantul Goes to Campus** merupakan sarana edukasi publik bagi mahasiswa dan para akademisi.
- **SetnegReal** merupakan konten audio visual dengan konsep yang mengikuti tren dan gaya komunikasi digital terkini dalam menyampaikan informasi.
- **Setneg Sepekan** merupakan konten informatif yang menyajikan rangkuman aktivitas Presiden, Wakil Presiden, serta Menteri Sekretaris Negara dalam kurun waktu satu minggu.
- **Sorot Setneg** merupakan konten yang menyajikan rangkuman aktivitas Presiden, Wakil Presiden, serta Menteri Sekretaris Negara dalam kurun waktu satu bulan.
- **SPACE** (Setneg Punya Cerita) menyuguhkan narasi ringan dan inspiratif tentang aktivitas pemerintahan.
- **SERASI** (Setneg Serap Aspirasi) membuka ruang dialog dua arah untuk menyerap masukan dari publik.



Selain itu, berbagai kegiatan kehumasan lainnya, seperti pelatihan komunikasi publik, produksi konten kreatif, serta penyelenggaraan forum-forum komunikasi strategis, juga terus digencarkan untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dalam dinamika pemerintahan.

BAB III

KERJA SAMA HUBUNGAN MASYARAKAT DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK



PENERIMAAN KUNJUNGAN DELEGASI

Kunjungan Universitas Islam Indonesia

Kemensetneg melalui Biro Humas berkolaborasi dengan Kantor Komunikasi Presiden menerima kunjungan mahasiswa Forum Kajian dan Penulisan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia pada Selasa (7/1/2025), dihadiri oleh 50 orang dan bertempat di Ruang Rapat Lantai 4 Gedung 3 Kemensetneg. Kunjungan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang peran hukum dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan seiring dengan kompleksitas dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang terus berkembang. Pemahaman ini tidak hanya memperkuat kapasitas mereka dalam menganalisis isu-isu hukum yang berkaitan dengan kebijakan publik, tetapi juga memberikan kontribusi langsung terhadap upaya memperkuat sistem hukum di Indonesia yang berperan vital dalam keberlanjutan pembangunan negara.





Kunjungan Universitas Gadjah Mada



Kemensetneg melalui Biro Humas menerima kunjungan delegasi Himpunan Mahasiswa Geografi Pembangunan, Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada pada Selasa (4/2/2025). Bertempat di Ruang Rapat Lantai 4, Gedung 3, Kemensetneg, kegiatan ini diikuti oleh 50 mahasiswa sebagai bagian dari program pembelajaran dan pengayaan wawasan. Kunjungan ini bertujuan memperluas pemahaman mahasiswa mengenai peran strategis generasi muda dalam pembangunan bangsa, program-program prioritas pemerintah, serta upaya percepatan visi Indonesia Emas 2045.



Kunjungan Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Kemensetneg melalui Biro Humas menerima kunjungan mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Atma Jaya Yogyakarta pada Senin (10/2/2025). Bertempat di Ruang Rapat Lantai 2, Gedung Sayap Timur, Kemensetneg, kegiatan ini diikuti oleh mahasiswa sebagai bagian dari program pembelajaran lapangan. Kunjungan ini bertujuan memperluas wawasan mahasiswa mengenai komunikasi strategis pemerintahan, peran generasi muda dalam mendukung program-program prioritas pemerintah, serta penguatan pemahaman terhadap visi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Kunjungan Universitas Sebelas Maret Surakarta



Kemensetneg melalui Biro Humas menerima kunjungan mahasiswa Program Magister Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta pada Selasa (15/4/2025), yang berlangsung di Ruang Aspirasi, Lantai 2, Gedung Sayap Timur, Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat. Kunjungan ini bertujuan untuk memperluas wawasan para mahasiswa mengenai proses pembentukan peraturan perundang-undangan hingga menjadi produk hukum, serta memahami peran strategis Kemensetneg dalam penyusunan regulasi tersebut. Selain itu, para mahasiswa juga memperoleh paparan terkait berbagai program prioritas pemerintah, baik yang sedang dilaksanakan maupun yang direncanakan ke depan, guna mendorong partisipasi aktif generasi muda dalam menyongsong visi Indonesia Emas 2045.



Kunjungan Universitas Lampung

Kemensetneg melalui Biro Humas menerima kunjungan mahasiswa Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung pada Rabu (14/5/2025) di Ruang Rapat Lt. 4 Gedung 3 Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka mempelajari implementasi good governance dalam meningkatkan kualitas pemerintah, serta memahami peran strategis Kemensetneg dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik.

Kunjungan Universitas Gadjah Mada



Kemensetneg melalui Biro Humas bekerja sama dengan Deputi Bidang Dokumentasi, Diseminasi, Arsip Kepresidenan dan Kementerian Sekretariat Dukungan Kabinet, menerima kunjungan studi lapangan dari mahasiswa Program Studi Sarjana Terapan Pengelolaan Arsip dan Rekaman Informasi, Departemen Bahasa, Seni, dan Manajemen Budaya Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada, pada Selasa (14/5/2025). Bertempat di Ruang Rapat Lantai 4, Gedung 3 Kemensetneg, Jakarta Pusat, sebanyak 67 mahasiswa mengikuti kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif terkait pengelolaan arsip di lingkungan Kemensetneg, khususnya pengelolaan arsip kepresidenan sebagai elemen vital dalam tata kelola pemerintahan.



Kunjungan Universitas Pendidikan Indonesia

Kemensetneg melalui Biro Humas menerima kunjungan 66 mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia pada Rabu (28/5/2025). Bertempat di Ruang Rapat Lantai 4 Gedung 3 Kemensetneg, kegiatan ini bertujuan memperluas wawasan mahasiswa tentang peran strategis komunikasi publik dalam mendukung program-program prioritas pemerintah, khususnya Program Sekolah Rakyat, serta memperkuat pemahaman terhadap tata kelola komunikasi pemerintahan.

Kunjungan BEM fakultas Hukum Unair



Kemensetneg melalui Biro Humas menerima kunjungan delegasi Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga sebanyak 59 orang di Ruang Rapat Lantai 4 Gedung III Kemensetneg, pada Selasa (1/7/2025). Kegiatan ini diselenggarakan sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi antara Kemensetneg dengan beragam pemangku kepentingan. Secara khusus, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap berbagai program prioritas pemerintah, dan juga mengenai proses legislasi atau pembentukan peraturan perundang-undangan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem administrasi hukum di lingkungan Kemensetneg



Kunjungan Universitas Surakarta

Kemensetneg melalui Biro Humas menerima kunjungan mahasiswa program studi Ilmu Administrasi Negara dan program studi Ilmu Komunikasi Universitas Surakarta, sebanyak kurang lebih 130 peserta, di Aula Hoegeng, Gedung III Kemensetneg, Jakarta, Rabu (16/7/2025). Kunjungan sebagai bagian dari upaya pengayaan wawasan akademik dan praktis terkait peranan strategis Kemensetneg dalam mendukung kelancaran operasional pemerintahan, khususnya dalam bidang kesekretariatan negara serta pengelolaan komunikasi dan hubungan kelembagaan di tingkat nasional.

Kunjungan Universitas Sains Al-Qur'an



Kemensetneg melalui Biro Humas menerima kunjungan 63 mahasiswa Universitas Sains Al-Qur'an Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam dan Sosial Politik pada Selasa (29/7/2025). Bertempat di Aula Hoegeng, Gedung 3, Kementerian Sekretariat Negara, kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka sosialisasi logo dan tema Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kunjungan ini bertujuan meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai makna kemerdekaan, menumbuhkan semangat kebangsaan, serta mendorong partisipasi aktif generasi muda dalam mensukseskan peringatan HUT ke-80 RI dan mendukung pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.



Kunjungan Universitas Bengkulu dan BEM Universitas Brawijaya

Kemensetneg melalui Biro Humas menerima kunjungan mahasiswa Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Bengkulu dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya pada Rabu (6/8/2025), di Gedung Krida Bhakti, Jakarta Pusat. Kegiatan ini bertujuan memperluas wawasan mahasiswa terkait peran strategis pemerintah, khususnya Kemensetneg, dalam tata kelola pemerintahan serta penyiapan peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan ini sekaligus menjadi ruang dialog antara pemerintah dan generasi muda.

Kunjungan YPI Al Azhar



Kemensetneg melalui Biro Humas menerima kunjungan studi banding dari Bagian Tata Usaha Yayasan Pesantren Islam Al Azhar, Jakarta, pada Rabu (8/10/2025). Bertempat di Ruang Aspirasi Kemensetneg, kegiatan ini diikuti oleh jajaran pengelola tata usaha YPI Al Azhar sebagai bagian dari agenda pengembangan kapasitas kelembagaan. Kunjungan ini bertujuan memperluas wawasan dan berbagi pengalaman terkait tata kelola organisasi, khususnya di bidang kehumasan, persuratan, kerumahtanggaan, protokoler, serta keamanan, guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan dan pengelolaan administrasi lembaga.



Kunjungan 100 Ketua OSIS SMA

Kemensetneg melalui Biro Humas untuk berkolaborasi dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam menerima kunjungan Kelompok Studi Mahasiswa Universitas Indonesia yang bekerja sama dengan Forum OSIS Nasional di Aula Hoegeng, Gedung Sekretariat Dukungan Kabinet, pada Senin (27/10/2025). Kunjungan ini diikuti oleh lebih dari 100 ketua OSIS SMA dari 34 provinsi di Indonesia. Kegiatan tersebut menjadi wadah pembelajaran dan dialog inspiratif bagi generasi muda tentang pentingnya kepemimpinan, semangat kebangsaan, serta peran aktif pemuda dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.

Kunjungan SMP Prima Cendekia Islami



Kemensetneg melalui Biro Humas menerima kunjungan dari SMP Prima Cendekia Islami di Gedung Krida Bhakti, Jakarta, pada Rabu (5/11/2025). Kunjungan ini bertujuan memberikan wawasan kepada siswa mengenai tugas dan fungsi Kemensetneg sebagai lembaga yang mendukung kerja Presiden dan Wakil Presiden. Dalam kunjungan ini juga memperingati satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming



Kunjungan Universitas Padjadjaran

Kemensetneg melalui Biro Humas menerima kunjungan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Padjadjaran pada Selasa (11/11/2025). Bertempat di Gedung Krida Bhakti, Jakarta Pusat, kegiatan ini diikuti oleh 129 mahasiswa sebagai bagian dari program pembelajaran lapangan. Kunjungan ini bertujuan memperluas wawasan mahasiswa mengenai tata kelola pemerintahan, perumusan kebijakan publik, serta arah pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Kunjungan Universitas Islam Darussalam (UNIDA) Gontor

Kemensetneg melalui Biro Humas menerima kunjungan akademik mahasiswa Program Studi Komunikasi UNIDA Gontor pada Kamis (27/11/2025) untuk membangun ruang dialog bagi para mahasiswa agar memahami secara langsung praktik komunikasi publik serta proses penyelenggaraan administrasi kenegaraan di lingkungan pemerintah pusat. Kegiatan ini juga menyoroti bagaimana komunikasi berkaitan dengan citra organisasi.















SETNEG MANTUL GOES TO CAMPUS

Kemensetneg Goes to Campus Edisi Universitas Negeri Jakarta

Biro Humas Kemensetneg menyelenggarakan Setneg Mantul Goes to Campus di Universitas Negeri Jakarta pada Selasa (22/7/2025) dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan ini bertujuan mengajak generasi muda kampus untuk turut menyemarakkan peringatan kemerdekaan, menanamkan nilai-nilai kebangsaan, serta memperkuat sinergi antara pemerintah dan dunia pendidikan dalam mendukung pembangunan nasional. Melalui dialog dan kolaborasi aktif, kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan literasi, memperluas wawasan mahasiswa, serta menumbuhkan semangat persatuan, pengabdian, dan cinta tanah air.



Kemensetneg Goes to Campus Edisi Universitas Tarumanagara

Biro Humas Kemensetneg menyelenggarakan Setneg Mantul Goes to Campus di Universitas Tarumanagara pada Kamis (24/7/2025) dalam rangka menggaungkan logo dan tema Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, "Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju".

Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah dan dunia pendidikan, mendorong partisipasi aktif generasi muda, serta menanamkan nilai-nilai kebangsaan dalam menyongsong Indonesia maju. Melalui dialog dan kolaborasi bersama civitas academica, kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan literasi informasi publik, memperluas wawasan kebangsaan, serta memperkokoh semangat persatuan dan gotong royong di kalangan mahasiswa.



Kemensetneg Goes to Campus Edisi Universitas Kebangsaan Republik Indonesia

Biro Humas Kemensetneg menyelenggarakan kegiatan kolaborasi program kerja sama kehumasan bersama Universitas Kebangsaan Republik Indonesia pada Selasa (18/11/2025) sebagai langkah memperkuat sinergi komunikasi publik dan pengembangan kapasitas kelembagaan.

Kegiatan ini diharapkan mampu mendorong terwujudnya tata kelola kehumasan yang profesional, memperluas ruang kolaborasi multi-stakeholder, serta meningkatkan literasi komunikasi publik di lingkungan perguruan tinggi dalam rangka menyiapkan generasi muda yang unggul dan berdaya saing.



KOMISI PERCEPATAN REFORMASI POLRI

Reformasi Polri, Pilar Asta Cita Menuju 2045



Kepala Biro Humas Kemensetneg selaku Sekretariat Komisi Percepatan Reformasi Polri, Komisi Percepatan Reformasi Polri merealisasikan salah satu pilar strategis dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 pada 7 November 2025, sesuai dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto.



Serap Aspirasi Bersama Advokat dan Lembaga Bantuan Hukum, Jakarta

Kepala Biro Humas Kemensetneg selaku Sekretariat Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) memfasilitasi audiensi KPRP dengan organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum pada 9 November 2025 di Ruang Aspirasi Kemensetneg, Jakarta. Audiensi tersebut menghimpun masukan terkait penguatan reformasi Polri, meliputi pendampingan hukum sejak penyidikan, transparansi penunjukan advokat, pengawasan internal dan eksternal, digitalisasi layanan, serta akses keadilan yang nondiskriminatif.

Serap Aspirasi Masyarakat Dalam jaringan, Komisi Percepatan Reformasi Polri Melalui WhatsApp dan Surel

Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kemensetneg selaku Sekretariat Komisi Percepatan Reformasi Komisi Percepatan Reformasi Polri. Komisi Percepatan Reformasi Polri pada Rabu, (19/11/2025) di Jakarta, memberikan kesempatan luas kepada masyarakat untuk menyampaikan masukan terkait upaya reformasi Polri, baik dalam bentuk saran, kritik, dan pengaduan. Hal ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya, Komisi Percepatan Reformasi Polri membuka layanan melalui surat elekronik (surel) dan aplikasi pesan WhatsApp.





Serap Aspirasi Dengan Lembaga Toleransi Beragama, Jakarta

Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kemensetneg selaku Sekretariat Komisi Percepatan Reformasi Polri. Komisi Percepatan Reformasi Polri melakukan dialog dengan berbagai kalangan masyarakat untuk menghimpun aspirasi dari berbagai Lembaga Toleransi Beragama pada Selasa (25/11/2025) bertempat di Ruang Aspirasi Kementerian Sekretariat Negara. Audiensi bertujuan untuk menghimpun berbagai aspirasi dan memperluas keterlibatan publik, sebagai upaya memastikan bahwa reformasi Polri tidak hanya berfokus pada pembenahan internal, tetapi juga pada penguatan hubungan yang konstruktif antara masyarakat dan institusi kepolisian.

Serap Aspirasi dengan Berbagai Lembaga Bantuan Hukum, Jakarta



Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kemensetneg selaku Sekretariat Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) memfasilitasi audiensi KPRP dengan sejumlah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) pada Selasa (25/11/2025) di Ruang Aspirasi, Kemensetneg. Audiensi ini menjadi ruang partisipasi publik untuk menghimpun masukan dalam mendukung reformasi Polri yang tidak hanya memperkuat institusi, tetapi juga hubungan antara masyarakat dan kepolisian. KPRP selanjutnya akan melanjutkan pengumpulan data, dialog publik, dan analisis sebagai bahan penyusunan rekomendasi kepada Presiden RI.



Serap Aspirasi Bersama Pegiat Lingkungan, Jakarta

Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kemensetneg selaku Sekretariat Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) memfasilitasi audiensi KPRP dengan perwakilan pegiat lingkungan di Ruang Aspirasi Kemensetneg, Rabu (26/11/2025). Audiensi ini bertujuan menghimpun aspirasi dan rekomendasi terkait transformasi Polri di bidang lingkungan. Sejumlah masukan menyoroti penanganan laporan dan dugaan kriminalisasi warga dalam kasus lingkungan, serta merekomendasikan penguatan pengawasan eksternal, pencegahan konflik kepentingan, pengurangan kewenangan dan anggaran Polri, serta penerapan regulasi Anti-SLAPP.

Serap Aspirasi Perspektif Pers dan Jurnalis, Jakarta



Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kemensetneg selaku Sekretariat Komisi Percepatan Reformasi Polri. Komisi Percepatan Reformasi Polri mengadakan audiensi dengan asosiasi pers di Ruang Aspirasi, Kementerian Sekretariat Negara, pada Rabu (26/11/2025). Kegiatan ini bertujuan menampung rekomendasi dari pihak pers yang sering berinteraksi dengan Polri. Berbagai masukan kritis mengemuka, termasuk usulan restrukturisasi kelembagaan Polri, permintaan peningkatan perlindungan hukum dan keamanan bagi jurnalis dari kekerasan fisik maupun serangan siber, serta pentingnya pendidikan HAM dan etika dalam interaksi polisi-jurnalis.



Serap Aspirasi Strategis bersama Ombudsman RI dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Jakarta

Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kemensetneg selaku Sekretariat Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) memfasilitasi audiensi KPRP dengan Ombudsman RI dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Ruang Aspirasi Kemensetneg, Rabu (26/11/2025). Audiensi ini membahas peningkatan tindak lanjut atas laporan masyarakat serta rekomendasi untuk menempatkan pelayanan publik sebagai inti reformasi, memperkuat sistem talenta, dan mempercepat digitalisasi. LPSK juga menekankan pentingnya penguatan sinergi dan pola kerja integratif antara kedua institusi di lapangan.

Serap Aspirasi Berbagai Kelompok Masyarakat Sipil, Jakarta



Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kemensetneg selaku Sekretariat Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) memfasilitasi audiensi KPRP dengan berbagai kelompok masyarakat sipil pada Selasa (2/12/2025) di Ruang Aspirasi, Kemensetneg. Audiensi ini bertujuan menghimpun kritik, masukan, dan aspirasi sebagai bahan perbaikan reformasi Polri. Sejumlah isu yang dibahas meliputi evaluasi peraturan internal dan mekanisme penyelidikan, reformasi struktural dan kelembagaan, termasuk wacana penempatan Polri di bawah koordinasi kementerian, serta pentingnya membedakan kritik, satire, dan hoaks dalam menjaga ruang demokrasi.



Serap Aspirasi Dengan Koalisi Masyarakat Sipil Bidang Penegakan Hukum, Jakarta

Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kemensetneg selaku Sekretariat Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) memfasilitasi audiensi KPRP dengan cluster koalisi masyarakat sipil bidang penegakan hukum di Ruang Aspirasi Kemensetneg pada Selasa (2/12/2025). Audiensi ini bertujuan menghimpun masukan untuk memperkuat reformasi Polri, khususnya dalam aspek regulasi dan penegakan hukum. Masukan yang disampaikan meliputi evaluasi penanganan korupsi, reformasi kelembagaan dan penguatan akuntabilitas, optimalisasi pengawasan internal dan eksternal, serta transparansi rekrutmen dan penerapan pendekatan pelayanan yang sensitif gender.

Serap Aspirasi Perkuat Inklusivitas bersama Lembaga Perempuan, Anak, dan Disabilitas, Jakarta



Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kemensetneg selaku Sekretariat Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) memfasilitasi kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat di Ruang Aspirasi Kemensetneg pada 3 Desember 2025. Kegiatan ini bertujuan menghimpun masukan untuk memperkuat transformasi Polri, khususnya dalam aspek inklusivitas dan kesetaraan gender. Masukan yang disampaikan meliputi penguatan mandat pelayanan, penyediaan layanan ramah disabilitas, sistem rekrutmen yang inklusif, penanganan kasus yang humanis dan akuntabel bagi perempuan serta kelompok rentan, serta reformasi rekrutmen Polwan yang berperspektif HAM.



Serap Aspirasi Dengan Para Pegiat Informasi Teknologi dan Siber, Jakarta

Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kemensetneg selaku Sekretariat Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) memfasilitasi audiensi KPRP dengan koalisi masyarakat sipil di bidang siber, teknologi informasi, dan sistem digital di Ruang Aspirasi Kemensetneg, Rabu (3/12/2025). Audiensi membahas penguatan kewenangan yang akuntabel, peningkatan kapasitas SDM Polri, literasi digital, penanganan kejahatan siber berbasis AI, serta penguatan kerja sama lintas sektor dan internasional sebagai bahan penyusunan rekomendasi reformasi Polri yang adaptif terhadap tantangan keamanan digital.

Serap Aspirasi Bersama Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Jakarta

Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kemensetneg selaku Sekretariat Komisi Percepatan Reformasi Polri. Komisi Percepatan Reformasi Polri menggelar audiensi dengan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) di Ruang Aspirasi, Kementerian Sekretariat Negara pada Selasa (9/12/2025). Pertemuan ini merupakan bagian dari rangkaian penyerapan aspirasi dalam penyusunan rekomendasi kebijakan percepatan reformasi kepolisian.





Serap Aspirasi Bersama Purnawirawan dan Organisasi Profesi, Jakarta

Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kemensetneg selaku Sekretariat Komisi Percepatan Reformasi Polri. Komisi Percepatan Reformasi Polri menggelar audiensi bersama Persatuan Purnawirawan Polri, Ikatan Sarjana Ilmu Kepolisian (ISIK), serta Ikatan Sarjana dan Profesi Perpolisian Indonesia (ISPPI), pada Rabu, (10/12/2025), bertempat di Ruang Aspirasi Kementerian Sekretariat Negara, pertemuan ini bertujuan untuk revisi instrumen hukum, penguatan regulasi tugas dan fungsi Polri, pembenahan sistem pendidikan, penataan sistem kepangkatan, serta penerapan meritokrasi dan penguatan tata kelola kelembagaan, sebagai bahan perumusan rekomendasi kebijakan percepatan reformasi Polri yang lebih profesional, akuntabel, dan berorientasi pada misi institusional.

Serap Aspirasi Bersama Tokoh Agama dan Aktivis Perempuan, Jakarta



Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kemensetneg selaku Sekretariat Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) memfasilitasi audiensi KPRP dengan organisasi kemasyarakatan keagamaan dan aktivis perempuan di Ruang Aspirasi Kemensetneg, Jakarta, Rabu (10/12/2025). Audiensi membahas penguatan integritas, kepastian hukum, pendekatan humanis, pengarusutamaan perspektif gender dan HAM, serta peningkatan profesionalisme Polri. Masukan dari tokoh agama dan aktivis perempuan tersebut menjadi bahan perumusan rekomendasi kebijakan reformasi kepolisian yang inklusif, akuntabel, dan berkeadilan.



Serap Aspirasi Bersama Tokoh Akademik dan Masyarakat Aceh

Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kemensetneg selaku Sekretariat Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) memfasilitasi public hearing KPRP dengan masyarakat Aceh di Ruang Senat Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Kamis (11/12/2025). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menjaring aspirasi publik di daerah setelah rangkaian audiensi di Jakarta. Akademisi, tokoh adat dan agama, aktivis perempuan, mahasiswa, lembaga bantuan hukum, serta organisasi masyarakat sipil menyampaikan masukan terkait reformasi Polri, meliputi aspek struktural, kultural, instrumental, dan operasional, termasuk rekrutmen, pendidikan, pengawasan, HAM, netralitas politik, dan pemberantasan korupsi.

Serap Aspirasi Bersama Tokoh Adat, Tokoh Agama, dan Akademisi Di Ambon, Provinsi Maluku



Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kemensetneg selaku Sekretariat Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) memfasilitasi public hearing KPRP bersama masyarakat Maluku di Universitas Pattimura, Ambon, Jumat (12/12/2025). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperluas pelibatan publik dalam proses reformasi Polri. Dalam pertemuan tersebut disampaikan bahwa sebagai institusi penegak hukum, legitimasi Polri tidak hanya bersumber dari landasan hukum, tetapi juga bergantung pada dukungan dan kepercayaan masyarakat.



KPRP Perluas Serap Aspirasi Masyarakat ke Sumatera Utara

Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kemensetneg selaku Sekretariat Komisi Percepatan Reformasi Polri. Komisi Percepatan Reformasi Polri memperluas penjaringan aspirasi publik dengan menggelar audiensi dan serap masukan masyarakat di Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan pada (12/12/2025) di Universitas Sumatera Utara, Kota Medan. Kegiatan ini dihadiri oleh unsur akademisi, insan pers, pemerintah daerah, serta perwakilan masyarakat sipil, audiensi ini merupakan bagian dari tahapan penyerapan aspirasi publik, bahwa berbagai masukan mencerminkan persoalan publik yang serupa di berbagai daerah.

KPRP Serap Aspirasi bersama Tokoh Masyarakat Akademisi, Tokoh Agama, dan Pelaku Usaha, Sulawesi Tengah



Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kemensetneg selaku Sekretariat Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) memfasilitasi audiensi penyerapan aspirasi masyarakat di Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, Sulawesi Tengah, Selasa (16/12/2025). Audiensi membahas pentingnya reformasi Polri yang berkelanjutan, penguatan pengawasan internal dan eksternal, peningkatan profesionalisme SDM, transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum, serta penguatan peran kepolisian sektor yang dekat dengan masyarakat. Masukan lainnya mencakup pembenahan sistem rekrutmen dan penempatan personel serta penguatan penerapan prinsip HAM.



Serap Aspirasi Bersama Elemen Masyarakat Daerah di Makassar

Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kemensetneg selaku Sekretariat Komisi Percepatan Reformasi Polri. Komisi Percepatan Reformasi Polri melaksanakan kegiatan public hearing penyerapan aspirasi bersama berbagai elemen masyarakat Sulawesi Selatan pada Selasa, (16/12/2025), bertempat di Universitas Hasanuddin. Forum ini diselenggarakan untuk menghimpun pandangan dan pengalaman masyarakat daerah sebagai bagian dari proses perumusan kebijakan percepatan reformasi Polri yang berbasis partisipasi publik.

Serap Aspirasi Bersama Berbagai Lapisan Masyarakat, Kalimantan Timur



Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kemensetneg selaku Sekretariat Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) memfasilitasi audiensi KPRP dengan sejumlah unsur masyarakat Kalimantan Timur di Universitas Balikpapan, Selasa (16/12/2025). Audiensi ini bertujuan menjaring aspirasi dari berbagai lapisan masyarakat sebagai bahan penyusunan rekomendasi percepatan reformasi Polri. Sejumlah isu yang mengemuka antara lain konflik agraria antara masyarakat dan korporasi, penanganan persoalan lingkungan hidup, serta sektor pertambangan sebagai masukan dalam perumusan kebijakan reformasi Polri.



Serap Aspirasi Bersama Masyarakat Adat dan Pemangku Kepentingan Daerah Berbasis Kearifan Lokal, Bali

Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kemensetneg selaku Sekretariat Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) memfasilitasi public hearing bersama perwakilan masyarakat adat, akademisi, tokoh masyarakat, mahasiswa, dan unsur kepolisian daerah di Universitas Udayana, Bali, Jumat (19/12/2025). Forum ini merupakan bagian dari agenda nasional KPRP untuk memperluas partisipasi publik dalam perumusan rekomendasi reformasi Polri yang berkelanjutan, akuntabel, dan berorientasi pada kepercayaan masyarakat.

Penyerapan Aspirasi Dari Organisasi Kemasyarakatan dan Unsur Mahasiswa di Yogyakarta



Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kemensetneg selaku Sekretariat Komisi Percepatan Reformasi Polri. Komisi Percepatan Reformasi Polri melaksanakan kegiatan audiensi dan serap aspirasi publik bersama akademisi, mahasiswa, organisasi masyarakat sipil, dan tokoh budaya pada Senin, (22/12/2025), di Universitas Gadjah Mada, Audiensi ini bertujuan untuk menghimpun masukan atau konsultasi publik dalam perumusan arah reformasi Polri. reformasi Polri harus dilakukan secara menyeluruh melalui penguatan akuntabilitas, transparansi, serta peneguhan Polri sebagai bagian dari masyarakat sipil.



Serap Aspirasi Bersama Budayawan untuk Merumuskan Reformasi Polri yang Berbasis Nilai Budaya di Yogyakarta

Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kemensetneg selaku Sekretariat Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) memfasilitasi audiensi dan penyerapan aspirasi bersama 25 budayawan dari Yogyakarta, Solo, dan sekitarnya di Galeri Seni Le Gareca, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin (22/12/2025). Kegiatan ini bertujuan menghimpun pandangan komunitas seni dan budaya terkait arah reformasi Polri, khususnya dalam hal kebebasan berekspresi, pengelolaan ruang publik, dan pelayanan kepolisian kepada masyarakat.

MEDIA VISIT

Media Visit ANTARA



Keberhasilan penyebaran informasi mengenai kerja-kerja dan capaian pemerintah tidak dapat dilepaskan dari peran dan kolaborasi aktif antara pemerintah dan media. Dengan berbagai kanal media yang hari ini digunakan oleh pemerintah dan media, upaya diseminasi informasi dan agenda setting dilakukan secara cepat dan real-time, untuk menciptakan masyarakat yang teredukasi (*educated society*) sehingga disinformasi dan hoaks dapat diminimalisir. Dengan semangat tersebut, Kemensetneg melalui Biro Humas melakukan kunjungan media ke Kantor Berita ANTARA yang bertempat di ANTARA Heritage Center, Jakarta pada Jumat (21/2/2025).



Media Visit GarudaTV

Dalam upaya memperkuat sinergi komunikasi publik, Kemensetneg melalui Biro Humas melakukan kunjungan media ke stasiun televisi digital GarudaTV di Gedung Garuda, Jakarta Selatan, Selasa (29/4/2025). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperluas jangkauan diseminasi informasi dan meningkatkan kualitas komunikasi pemerintah kepada masyarakat, sekaligus mengimplementasikan visi Menteri Sekretaris Negara dalam membangun kemitraan aktif dengan media massa. Kolaborasi dengan media diharapkan dapat memperluas penyampaian informasi mengenai kebijakan dan program strategis pemerintah.

Media Visit TVOne



Dalam upaya mengakselerasi visi besar Indonesia Emas 2045, yang menjadi prioritas kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui pencanangan berbagai program prioritas, Biro Humas Kemensetneg melakukan media visit ke stasiun televisi nasional TVOne, Kamis (8/5/2025). Berlokasi di Kantor TVOne, Jakarta Timur, kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat kolaborasi strategis dalam penyebaran informasi publik serta mengoptimalkan kualitas komunikasi pemerintah dengan masyarakat. Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar Kemensetneg dalam membantu kerja pemerintah dengan memperluas inovasi konten, baik di kanal televisi maupun di platform media digital.



Biro Humas Kemensetneg Sambangi SnackVideo

Biro Humas Kemensetneg melakukan kunjungan ke platform media sosial SnackVideo di The Plaza Office Tower, Jakarta, Rabu (4/6/2025), untuk menjajaki potensi kolaborasi dalam optimalisasi komunikasi publik pemerintah. Pertemuan yang dipimpin Kepala Biro Humas Eddy Cahyono Sugiarto dan Director of Government Relations SnackVideo Yulika Satria Daya tersebut membahas strategi penyebarluasan informasi program dan capaian pemerintah, khususnya kepada generasi muda. Pembahasan mencakup program strategis pemerintah, dukungan platform terhadap komunikasi pemerintah, serta fitur, jangkauan audiens, dan strategi konten SnackVideo.

Media Visit Kompas.com



Sebagai langkah strategis mendukung program prioritas kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, dalam rangka menyongsong Indonesia menuju Indonesia Emas 2045, Biro Humas Kemensetneg membangun hubungan dengan awak media melalui media visit ke Kompas.com, Jumat (11/7/2025). Berlokasi di kantor Kompas.com, Jakarta, pertemuan ini bertujuan untuk membangun kolaborasi strategis dalam menyampaikan narasi-narasi positif kepada masyarakat, terutama mengenai kerja dan capaian pemerintah. Upaya ini menjadi langkah konkret Kemensetneg untuk terus membangun sinergi dengan media massa sebagai bagian dari pendekatan multi stakeholders engagement.



Media Visit Media Indonesia

Kemensetneg terus memperkuat jejaring komunikasi publik melalui kolaborasi dengan media arus utama. Upaya ini diwujudkan melalui kunjungan Biro Humas Kemensetneg ke kantor redaksi Harian Media Indonesia di Jakarta Barat, Jumat (18/7/2025). Kunjungan tersebut membahas pentingnya sinergi pemerintah dan media dalam memperkuat diseminasi informasi yang akurat serta membangun kepercayaan publik. Peran media arus utama juga dinilai penting dalam mengawal narasi pembangunan nasional dan visi Presiden Prabowo Subianto menuju Indonesia Emas 2045.

Media Visit Tribun Jabar



Biro Humas Kemensetneg melakukan kunjungan media visit ke Tribun Jabar di Bandung, Rabu (17/11/2025). Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya mempererat kolaborasi dengan media lokal dalam menyebarluaskan informasi mengenai program-program prioritas pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Salah satu contoh yang disampaikan adalah program MBG, yang di banyak daerah termasuk wilayah 3T terbukti memberi manfaat signifikan bagi siswa, mulai dari peningkatan status gizi hingga kemudahan akses terhadap makanan bergizi.



Kemensetneg Media Visit ke Media Lokal Aceh

Sebagai langkah strategis mendukung program public hearing di Provinsi Aceh, Tim Sekretariat Komisi Percepatan Reformasi Polri melakukan kegiatan Media Visit pada tanggal (11/12/2025) di Universitas Syiah Kuala. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kolaborasi dan keterlibatan publik, utamanya dikalangan media untuk ikut di dalam proses penyerapan aspirasi sekaligus menyebarluaskan upaya pemerintah mempercepat reformasi di tubuh Polri. Institusi dan kantor berita yang dikunjungi antara lain Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Provinsi Aceh, Kantor Berita Antara Biro Aceh, Serambi News, dan TVRI Aceh.

Kemensetneg Media Visit ke Media Lokal di Makassar

Sebagai langkah konkrit mendukung program *public hearing*, Tim Sekretariat KPRP pada Senin (15/12/2025) telah melakukan kunjungan ke Kantor Berita Tribun Timur. Kepala Sekretariat KPRP, Eddy Cahyono Sugiarto, menjelaskan kepada Tribun Timur upaya *meaningful participation* yang telah menjaring lebih dari 78 elemen masyarakat sebelum turun langsung ke daerah. kegiatan ini sebagai upaya inklusif pelibatan seluruh lapisan masyarakat dengan menyediakan jalur komunikasi digital untuk memudahkan partisipasi masyarakat yang tidak hadir secara fisik atau masyarakat yang berasal dari wilayah yang tidak dikunjungi oleh KPRP.





Kemensetneg Media Visit ke media di Tribun Kaltim

Kementerian Sekretariat Negara selaku Sekretariat Komisi Percepatan Reformasi polri, menyambangi kantor Tribun Kaltim pada Senin (15/12/2025), di Balikpapan, Kalimantan Timur . Kegiatan ini bertujuan untuk serap aspirasi, dan mengetahui apa sebenarnya keinginan dan concern masyarakat, khususnya Kalimantan Timur, dalam rangka reformasi Polri.

Kemensetneg Media Visit ke Sulawesi Tengah

Sebagai langkah strategis audiensi dan penyerapan aspirasi, Tim Sekretariat Komisi Percepatan Reformasi Polri melaksanakan kunjungan ke sejumlah kantor berita pada Senin (15/12/2025) di Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi dan kerja sama, sekaligus mendorong partisipasi publik, khususnya insan pers, dalam proses penjaringan masukan serta penyebarluasan informasi mengenai berbagai langkah pemerintah dalam mempercepat reformasi di tubuh Polri.





Kemensetneg Media Visit ke Media Lokal Denpasar

Sebagai langkah strategis mendukung program public hearing. Tim Sekretariat KPRP melaksanakan media visit ke sejumlah kantor media lokal di Kota Denpasar, Bali, serta Pemerintah Daerah Provinsi Bali pada Kamis (18/12/2025). Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan insan pers serta pemerintah daerah, sekaligus memaksimalkan partisipasi masyarakat dalam proses penyerapan aspirasi publik. Institusi dan kantor media yang dikunjungi antara lain Kantor Berita Tribun Bali, serta Televisi Republik Indonesia (TVRI) Stasiun Bali, dan Pemerintah Daerah Provinsi Bali.

Kemensetneg Media Visit ke media di Yogyakarta

Sebagai bagian dari upaya mendukung penyerapan aspirasi masyarakat dalam percepatan reformasi Polri, Tim Kementerian Sekretariat Negara yang juga merupakan bagian dari Sekretariat KPRP melaksanakan media visit ke sejumlah media di Yogyakarta, Sabtu (20/12/2025). Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan insan pers sekaligus memperluas diseminasi informasi agar masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dan bermakna dalam proses penyerapan aspirasi.



SETNEG MENYAPA



Kemensetneg dan Museum Nasional Jalin Kolaborasi Strategis

Kemensetneg dan Museum Nasional berkolaborasi untuk memperkuat edukasi sejarah serta meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap warisan budaya bangsa. Sebagai bagian dari inisiatif tersebut, delegasi Kemensetneg melakukan rapat pembahasan kolaborasi di Museum Nasional, Jakarta, Rabu (12/3/2025). Kolaborasi ini sejalan dengan peran strategis Kemensetneg sebagai *back office* Presiden dan Wakil Presiden, khususnya dalam mendukung program prioritas Asta Cita, sekaligus memperkuat sinergi dengan berbagai instansi untuk memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Museum Nasional menyambut baik rencana sinergi tersebut sebagai bagian dari upaya mendukung diseminasi program prioritas nasional.

Kemensetneg Ajak Danantara Sukseskan HUT ke-80 Kemerdekaan RI



Kemensetneg mengunjungi kantor Badan Pengelola Investasi Danantara di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta, pada Kamis (17/7/2025). Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi antar lembaga pemerintah dan membangun ekosistem komunikasi nasional yang lebih kolaboratif, terbuka, terarah, dan berdampak nyata dalam mendukung program prioritas nasional, khususnya dalam rangka pelaksanaan rangkaian kegiatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia.



Kemensetneg Ajak Kalangan Santri Berperan Serta Sukseskan Asta Cita Songsong Indonesia Maju

Biro Humas Kemensetneg berpartisipasi dalam kegiatan Pancasila Saka Adisiswa dan Pancasila Saka Adikara bertema “Menghidupkan Nilai Pancasila dalam Keseharian Santri dan Masyarakat” yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila di Pesantren Al-Muttaqin, Jepara, Jawa Tengah, Kamis (9/10/2025). Kegiatan tersebut berfokus pada penguatan nilai-nilai Pancasila dan semangat kebangsaan di kalangan santri, sekaligus menjadi wadah untuk menginternalisasi misi pertama Asta Cita Presiden Prabowo, yaitu memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia, serta menjembatani nilai-nilai Pancasila dengan kehidupan pesantren.

Kemensetneg Terima Kunjungan Pemerintah Halmahera Tengah untuk Mempererat Kolaborasi Pusat-Daerah



Pemerintah terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan agenda pembangunan nasional. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penerimaan kunjungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah ke Kemensetneg, Senin (17/11/2025). Kegiatan yang dihadiri lebih dari 50 perwakilan pemerintah kabupaten tersebut menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi dan meningkatkan kapasitas melalui pendampingan di bidang hubungan masyarakat, keprotokolan, dan kearsipan di lingkungan pemerintah daerah.



Kemensetneg Lakukan Peninjauan Implementasi Program Prioritas Sekolah Rakyat

Kemensetneg melalui Biro Humas melakukan peninjauan implementasi program prioritas pemerintah sekolah rakyat di Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 16 Bandung, Selasa (18/11/2025), di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kepala Sekolah SRT 16 Bandung Yanti Widiastuti menyampaikan, sekolah ini memiliki 6 rombongan belajar dengan total 150 peserta didik yang terdiri dari jenjang menengah pertama dan menengah atas. Melalui kunjungan ini juga terungkap bahwa di tengah keterbatasan ekonomi para siswa-siswi SRT 16 Bandung tetap bersemangat untuk berprestasi, baik di bidang akademik mau ekstrakurikuler, seperti bela diri, seni tari, dan seni lukis.

BAB IV

SURVEI KEPUASAN PENERIMAAN KUNJUNGAN MASYARAKAT



Kementerian Sekretariat Negara senantiasa meningkatkan pelayanan-pelayanan yang dilakukan di lingkungan Kemensetneg, salah satunya pelayanan kunjungan masyarakat. Dalam praktiknya, Kemensetneg senantiasa mendapatkan feedback, baik langsung secara tatap muka maupun melalui kanal survei yang diberikan selepas kegiatan.

Kemensetneg berkomitmen bahwa kegiatan kunjungan masyarakat tidak hanya bersifat seremonial saja, namun juga menjadi sarana edukasi dan diseminasi informasi, serta cerminkan prinsip akuntabilitas lembaga dalam menjawab aspirasi dan masukan publik. Dalam menjaga kredibilitas Kemensetneg sebagai badan publik yang berada di jantung pemerintahan, Kemensetneg senantiasa mengapresiasi setiap upaya perbaikan dan masukan yang diberikan oleh para stakeholders, baik masyarakat umum, akademisi, maupun kementerian/lembaga.

Survei Kepuasan Penerimaan Kunjungan Masyarakat dilaksanakan sebagai bagian dari evaluasi berkelanjutan untuk mengukur efektivitas layanan dan tingkat kepuasan masyarakat. Hasil survei ini tidak hanya menjadi refleksi kinerja internal, tetapi juga menjadi dasar strategis dalam merancang program peningkatan SDM dan inovasi layanan.













A. Pertanyaan dalam bentuk skala

Pada tahun 2025, capaian outcome indeks pelayanan informasi publik dalam penerimaan kunjungan delegasi masyarakat dan/atau perguruan tinggi di Kementerian Sekretariat Negara menunjukkan hasil yang melampaui target. Dari target indeks pelayanan sebesar 4,15 skala Likert (1-6), realisasi mencapai **5,49 skala 6**.



Hasil ini mencerminkan bahwa layanan informasi publik yang diberikan oleh Biro Hubungan Masyarakat (Humas) kepada kunjungan delegasi masyarakat dan/atau perguruan tinggi tentang Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), baik dari segi materi yang diberikan maupun kualitas pelayanan secara keseluruhan, berada di atas target indeks pelayanan.

Indeks pelayanan informasi publik ini diukur berdasarkan 6 (enam) komponen penilaian dengan menggunakan skala Likert (1 s.d. 6) yang terdiri dari:

1 = sangat tidak memuaskan;
2 = tidak memuaskan;
3 = kurang memuaskan;
4 = cukup memuaskan;
5 = memuaskan;
6 = sangat memuaskan.

Pelaksanaan survei diukur melalui penilaian pelayanan publik dengan pernyataan sebagai berikut:

a. Kemudahan prosedur layanan publik yang diselenggarakan oleh Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara.
b. Kecepatan layanan publik yang diselenggarakan Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara.
c. Ketetapan penyelesaian layanan publik terhadap janji waktu pelayanan yang diselenggarakan oleh Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara.
d. Manfaat dari kegiatan layanan publik yang telah dilaksanakan oleh Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara.

e. Penguasaan dan kemampuan penyajian materi/informasi yang disampaikan oleh Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara.
f. Kedisiplinan petugas dalam memberikan layanan publik.
g. Tanggung jawab petugas dalam memberikan layanan publik. Kemampuan/kompetensi petugas dalam memberikan layanan publik Kesopanan dan keramahan petugas dalam memberikan layanan publik.
h. Kemampuan/kompetensi petugas dalam memberikan layanan publik.
i. Kesopanan dan keramahan petugas dalam memberikan layanan publik.
j. Tingkat kenyamanan pada lokasi kegiatan layanan publik di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.
k. Kondisi fasilitas yang digunakan dalam kegiatan layanan publik (ruangan auditorium, lobby, ruang ibadah, toilet, dan fasilitas bagi difabel).
l. Kondisi utilitas pada lokasi kegiatan layanan publik (air, pendingin ruangan, listrik, penerangan, jaringan internet, lift/elevator, dan alat pendukung K3).





B. Pertanyaan Ya/Tidak

Apakah ada pungutan atas layanan publik yang diberikan oleh Biro Hubungan Masyarakat, Kementerian Sekretariat Negara?

C. Pertanyaan Isian

- Informasi/layanan publik lain terkait dengan Kementerian Sekretariat Negara yang dibutuhkan.
- Berikan kritik/saran Anda guna perbaikan layanan publik yang diberikan oleh Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara

Pada tahun 2025, dilakukan penilaian terhadap kualitas layanan publik dalam menerima 19 kunjungan perwakilan masyarakat dari perguruan tinggi, sekolah, dan instansi pemerintah ke Kementerian Sekretariat Negara, yaitu:

1. Universitas Islam Indonesia
2. Universitas Gadjah Mada
3. Universitas Atma Jaya
4. SMA Taruna Nusantara
5. Universitas Negeri Lampung
6. Universitas Gadjah Mada
7. Universitas Pendidikan Indonesia
8. Universitas Airlangga
9. Universitas Surakarta
10. Universitas Sains Al-Quran
11. Universitas Bengkulu
12. Universitas Brawijaya
13. Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhar
14. Universitas Parahyangan
15. Forum Osis Nasional
16. Sekolah Menengah Pertama Prima Cendekia
17. Universitas Padjajaran
18. Universitas Negeri Padang
19. Universitas Darussallam Gontor

D. Lokasi Pengumpulan Data Survei

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan di lingkungan kantor Kementerian Sekretariat Negara maupun di tempat lain pada saat penerimaan delegasi. Berikut gambaran ruang penerimaan delegasi:

- Gedung Krida Bhakti



- Ruang Rapat Gedung III Kemensetneg



- Ruang Aspirasi



- Ruang Auditorium Serba Guna



- Ruang Sidang Kabinet

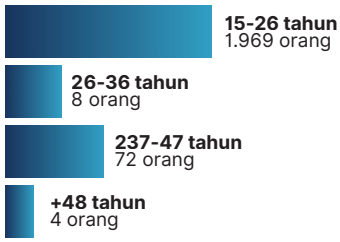


E. Jumlah Responden

Asal Delegasi

- Universitas Islam Indonesia
- Universitas Gadjah Mada
- Universitas Atma Jaya
- SMA Taruna Nusantara
- Universitas Negeri Lampung
- Universitas Gadjah Mada
- Universitas Pendidikan Indonesia
- Universitas Airlangga
- Universitas Surakarta
- Universitas Sains Al-Quran
- Universitas Bengkulu
- Universitas Brawijaya
- Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhar
- Universitas Parahyangan
- Forum Osis Nasional
- Sekolah Menengah Pertama Prima Cendekia
- Universitas Padjajaran
- Universitas Negeri Padang
- Universitas Darussallam Gontor

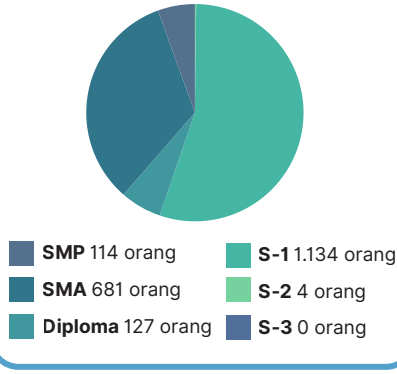
Umur



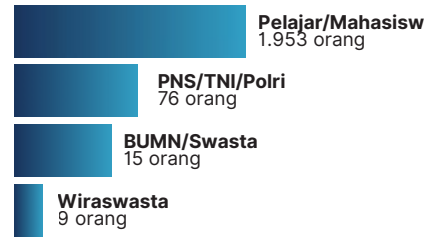
Jenis Kelamin



Pendidikan

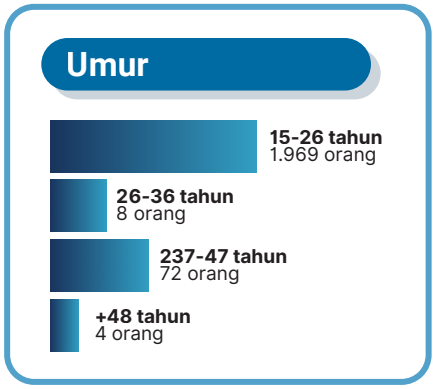


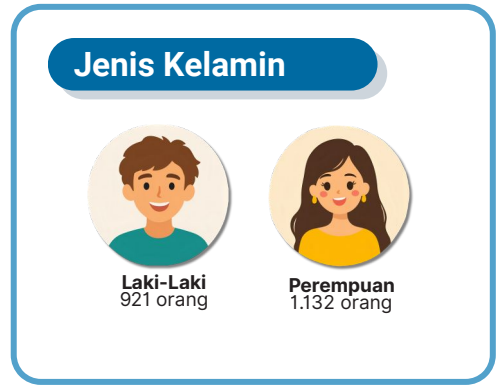
Pekerjaan

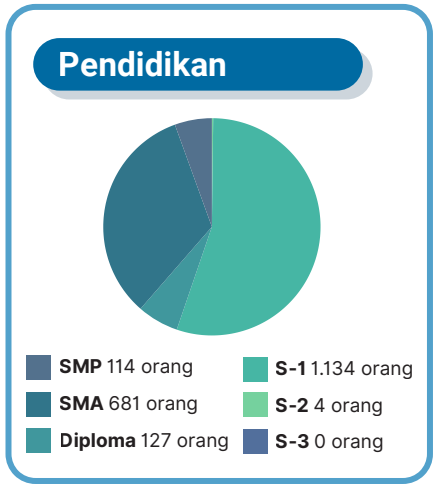


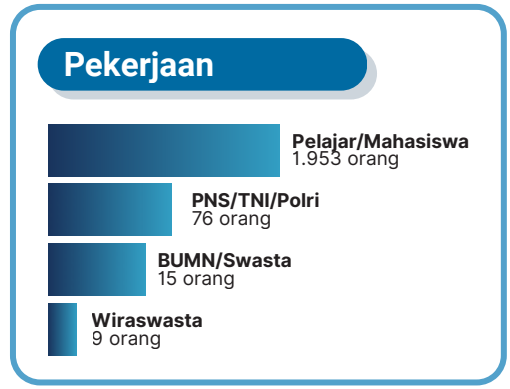
F. Rekapitulasi Data Responden

1.Rekapitulasi Data Responden









2. Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Unsur Kuisioner		Jawaban Responden					Total
		SS	S	A	TS	STS	
U1	Kemudahan prosedur layanan publik	1.432	570	41	8	2	2.053
U2	Kecepatan layanan publik	1.346	625	73	5	4	2.053
U3	Ketepatan penyelesaian layanan publik	1.465	503	69	14	2	2.053
U4	Manfaat dari kegiatan layanan publik	1.571	417	60	3	2	2.053
U5	Penguasaan dan kemampuan penyajian materi/informasi yang disampaikan	1.571	423	52	3	4	2.053
U6	Kedisiplinan petugas dalam memberikan layanan publik	1.531	465	45	10	2	2.053
U7	Tanggung jawab petugas dalam memberikan layanan publik	1.495	515	38	0	5	2.053
U8	Kemampuan/kompeten petugas dalam memberikan layanan publik	1.549	461	35	4	4	2.053
U9	Kesopanan dan keramahan petugas dalam memberikan layanan publik	1750	265	35	1	2	2.053
U10	Tingkat kenyamanan pada lokasi kegiatan layanan publik	1515	487	47	2	2	2.053
U11	Kondisi fasilitas yang digunakan dalam kegiatan layanan publik	1569	437	40	5	2	2.053

Unsur Kuisioner		Jawaban Responden					Total
		SS	S	A	TS	STS	
U12	Kondisi utilitas pada lokasi kegiatan layanan publik (air, pendingin ruangan, listrik, penerangan, jaringan internet, lift/elevator, alat pendukung K3)	1534	453	60	2	4	2.053
Jumlah Responden		18.328	5.621	595	57	35	24.636
Total Skor		91.640	28.105	2.975	285	175	123.180
Persentase		74,39%	22,81%	2,41%	0,25%	0,14%	100%

BAB V

DISEMINASI INFORMASI



Foto: Magnus Mueller pada Pexel

Memasuki tahun 2025, transformasi digital tidak lagi sekadar menjadi pilihan, melainkan sebuah keniscayaan dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang adaptif dan partisipatif. Bagi Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), penguatan komunikasi publik melalui media digital terus menjadi prioritas strategis guna memastikan arus informasi berjalan cepat, tepat, dan menjangkau masyarakat secara luas.

Di era yang ditandai dengan kecepatan arus informasi, media digital berfungsi sebagai jembatan utama antara pemerintah dan publik. Melalui optimalisasi kanal digital, Kemensetneg berupaya menghadirkan komunikasi yang tidak hanya informatif, tetapi juga interaktif dan transparan. Pendekatan ini memungkinkan masyarakat memperoleh akses langsung terhadap informasi resmi, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Sejalan dengan tuntutan keterbukaan informasi, pemanfaatan media digital pada tahun 2025 juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas konten yang edukatif dan kontekstual, serta responsif terhadap dinamika isu yang berkembang. Strategi ini menjadi bagian dari komitmen Kemensetneg dalam menjaga kredibilitas informasi, sekaligus meminimalisasi potensi disinformasi di ruang digital.

Implementasi strategi tersebut diwujudkan melalui pengelolaan situs web resmi www.setneg.go.id dan optimalisasi berbagai platform media sosial seperti Instagram, X, Facebook, YouTube, dan TikTok. Sepanjang tahun 2025, kanal-kanal ini dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi mengenai kegiatan Presiden, Wakil Presiden, serta agenda strategis Kemensetneg, dengan pendekatan komunikasi yang lebih terintegrasi, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan publik.



SEMARAK RANGKAIAN HUT KE-80 REPUBLIK INDONESIA 2025

Kirab Bendera & Teks Proklamasi

Acara ini dimulai dari Monumen Nasional (Monas) menuju Istana Merdeka menggunakan kereta kencana dan dikawal pasukan berkuda. Kirab ini melibatkan pasukan pengibar bendera dari 38 provinsi, diikuti dengan pembacaan teks proklamasi dan upacara pengibaran bendera yang dipimpin oleh Presiden sebagai inspektur upacara





Upacara Detik-Detik Proklamasi di Istana Merdeka

Acara ini dimulai dari Monumen Nasional (Monas) menuju Istana Merdeka menggunakan kereta kencana dan dikawal pasukan berkuda. Kirab ini melibatkan pasukan pengibar bendera dari 38 provinsi, diikuti dengan pembacaan teks proklamasi dan upacara pengibaran bendera yang dipimpin oleh Presiden sebagai inspektur upacara





Pesta Rakyat di Istana & Monas

Setelah upacara, Pesta Rakyat dibuka di halaman Istana Merdeka dan diadakan secara serentak di Monas, menjadi pertama kalinya dalam sejarah HUT RI di Istana Presiden. Pengunjung dapat menikmati:

- Pengunjung dapat menikmati:
- Panggung hiburan dan pertunjukan seni
- Sajian kuliner gratis dari UMKM dan masyarakat lokal
- Pertunjukan kembang api spektakuler pada malam hari
- Pedagang kaki lima sekitar Istana dan Monas juga turut berpartisipasi menyajikan hidangan untuk umum





Karnaval Budaya Malam Hari

Menutup rangkaian acara puncak, karnaval malam menampilkan instansi pemerintah, BUMN, TNI-Polri, dan peserta lainnya dengan mobil hias yang menampilkan program-program unggulan. Karnaval ini berangkat dari Monas menuju Simpang Semanggi, menghadirkan suasana meriah dan optimis dalam perayaan kemerdekaan





Merdeka Run 8.0K

Sebagai agenda terakhir dari Bulan Kemerdekaan, Merdeka Run 8.0K diselenggarakan beberapa hari setelah HUT, tepatnya pada tanggal 24 Agustus, dengan angka 8.0 menandai perayaan 80 tahun Kemerdekaan RI. Acara ini mendorong partisipasi masyarakat aktif dalam peringatan kemerdekaan





PROGRAM PRIORITAS PRESIDEN PRABOWO SUBIANTO

Sebagai garda terdepan dalam penyebarluasan informasi kebijakan pemerintah, Biro Humas Kementerian Sekretariat Negara pada tahun 2025 memfokuskan diri pada pengawalan komunikasi publik terkait lima program unggulan yang dicanangkan oleh Pemerintahan Presiden Prabowo. Program-program tersebut merupakan prioritas nasional yang tertuang dalam berbagai arahan Presiden serta dokumen perencanaan pembangunan yang dipublikasikan melalui kanal resmi pemerintah. Melalui pemanfaatan media sosial yang dimiliki, Biro Humas berupaya menyajikan informasi yang edukatif dan transparan, serta membagikan cerita-cerita inspiratif di balik implementasi program guna membangun pemahaman dan dukungan publik.



Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih: Bangun Desa, Indonesia Jaya

Dalam upaya memperkuat perekonomian dari tingkat akar rumput, pemerintah meluncurkan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang bertujuan membangun dan mengembangkan koperasi di seluruh desa dan kelurahan sebagai motor penggerak ekonomi lokal. Biro Humas Kementerian Sekretariat Negara secara aktif menyebarluaskan informasi mengenai pendirian koperasi, kisah sukses pengelolaan, serta dampaknya terhadap kemandirian desa. Diseminasi dilakukan melalui berbagai kanal media sosial yang dimiliki.





Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak usia sekolah dan kelompok rentan, pemerintah mengimplementasikan Program Makan Bergizi Gratis. Biro Humas berperan dalam mengedukasi publik mengenai manfaat program, mekanisme pelaksanaan, serta jangkauan penerima manfaat. Informasi tentang kolaborasi dengan pemerintah daerah dan pihak swasta dalam penyediaan makanan bergizi turut disosialisasikan secara luas melalui media sosial.

Sekolah Rakyat:
Memutus Kemiskinan Lewat Pendidikan

Mendukung upaya pemutusan rantai kemiskinan melalui pendidikan, pemerintah menyelenggarakan program Sekolah Rakyat yang memberikan akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat kurang mampu. Biro Humas mendiseminasikan informasi mengenai kurikulum, proses pendaftaran, serta kisah inspiratif para peserta didik yang merasakan manfaat program ini. Konten edukatif dan motivasional disajikan untuk mendorong partisipasi masyarakat.





Program Pembangunan dan Renovasi
3 Juta Rumah

Dalam rangka mewujudkan hunian layak bagi seluruh rakyat Indonesia, pemerintah mencanangkan program pembangunan baru dan renovasi rumah sebanyak tiga juta unit. Biro Humas menyebarluaskan informasi mengenai kriteria penerima bantuan, tahapan pembangunan, serta capaian di berbagai daerah. Cerita tentang keluarga yang menerima manfaat rumah layak huni menjadi bagian dari konten yang dibagikan untuk menginspirasi dan membangun kepercayaan publik.

Program Cek Kesehatan Gratis (CKG): Satu Sehat, Semua Sehat

Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, pemerintah meluncurkan Program Cek Kesehatan Gratis yang memungkinkan masyarakat memperoleh layanan pemeriksaan kesehatan dasar tanpa biaya. Biro Humas mengkomunikasikan lokasi layanan, jenis pemeriksaan, serta ajakan untuk memanfaatkan program ini. Diseminasi dilakukan secara masif melalui berbagai kanal media sosial guna menjangkau seluruh lapisan masyarakat.



KONTEN KREATIF

Setneg Mantul

Setneg Mantul merupakan strategi komunikasi dari Kemensetneg yang bertujuan menyampaikan berbagai aktivitas dan pencapaian Presiden, Wakil Presiden, serta Menteri Sekretaris Negara dengan cara yang kreatif dan efektif kepada masyarakat. Salah satu kegiatan unggulannya, Setneg Mantul Goes to Campus, yang pada tahun 2025 terus diperkuat sebagai ruang dialog kepada mahasiswa. Melalui kegiatan ini, mahasiswa tidak hanya mendapatkan informasi mengenai program prioritas nasional, tetapi juga diajak untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi serta memberikan perspektif kritis terhadap isu-isu strategis kebangsaan.





Setneg Sepekan

Setneg Sepekan merupakan konten informatif yang menyajikan rangkuman aktivitas Presiden, Wakil Presiden, serta Menteri Sekretaris Negara dalam kurun waktu satu minggu. Pada konten ini dikemas secara lebih dinamis dan adaptif terhadap perkembangan media digital, melalui format video singkat, infografis, serta narasi tertulis yang dipublikasikan secara rutin di media sosial resmi Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Konten ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi informasi publik, memperluas jangkauan komunikasi pemerintah, serta memberikan akses yang mudah dan ringkas bagi masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai agenda dan capaian pemerintah.





SPACE (Setneg Punya Cerita)

Setneg Punya Cerita (SPACE) merupakan konten wawancara yang menghadirkan pimpinan tinggi madya, ASN berprestasi, serta sosok-sosok inspiratif di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. SPACE dikemas dengan pendekatan storytelling yang lebih hangat dan personal, sehingga tidak hanya menampilkan jabatan, tetapi juga perjalanan, nilai, serta pengalaman para narasumber dalam menjalankan perannya. SPACE bertujuan menyebarkan energi positif, membangun kedekatan dengan audiens, serta memberikan inspirasi dan pembelajaran dari pengalaman nyata.



Setneg Real

Setneg Real merupakan konten kreatif berbasis video yang dikembangkan oleh Biro Hubungan Masyarakat Kemensetneg dengan konsep yang mengikuti tren dan gaya komunikasi digital terkini. Konten ini dikemas secara singkat, dinamis, dan relevan agar mudah dipahami oleh berbagai kalangan. Setneg Real bertujuan untuk menyampaikan informasi kelembagaan secara lebih segar dan menarik, meningkatkan keterlibatan (engagement) audiens di media sosial, serta memperluas jangkauan komunikasi Kemensetneg kepada masyarakat.

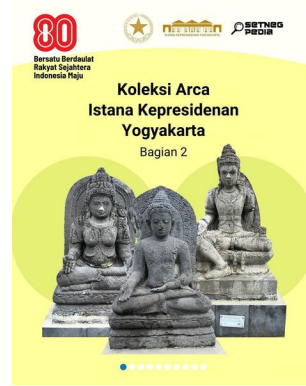




SetnegPedia

SetnegPedia adalah salah satu konten informasi Biro Humas yang membahas tentang fakta-fakta menarik dan informatif seputar program-program Kemensetneg serta kebijakan pemerintah secara umum.





Sorot Setneg

Sorot Setneg adalah konten bulanan dari Kemensetneg yang merangkum berbagai kegiatan Presiden, Wakil Presiden, serta Menteri Sekretaris Negara/Kemensetneg selama satu bulan.





SERASI (Setneg Serap Aspirasi)

Merupakan program komunikasi publik yang diinisiasi oleh Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia melalui Biro Hubungan Masyarakat sebagai wadah komunikasi dua arah antara institusi dan masyarakat. Program ini dirancang untuk menjaring aspirasi, kritik, masukan, serta ide konstruktif dari publik melalui berbagai format seperti diskusi publik, dialog daring, survei aspirasi, dan kolaborasi dengan mitra strategis. SERASI bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, memperkuat transparansi dan akuntabilitas institusi, serta membangun kedekatan dengan berbagai kelompok, termasuk akademisi, komunitas, dan generasi muda, sejalan dengan upaya menghadirkan komunikasi publik yang lebih adaptif, inklusif, dan kolaboratif.





Kaleidoskop Setneg

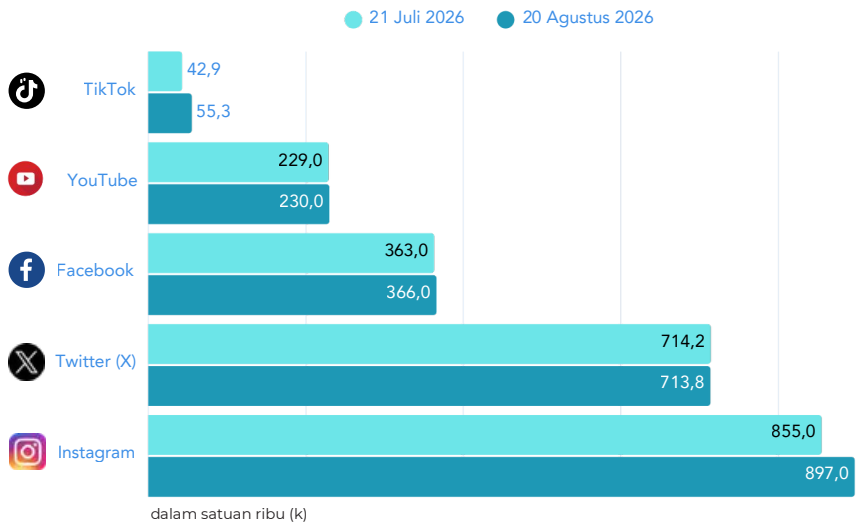
Kaleidoskop Setneg merupakan rangkuman tahunan yang menyoroti berbagai capaian, kebijakan, serta agenda penting yang dijalankan oleh Presiden, Wakil Presiden, dan Kemensetneg sepanjang tahun. Kaleidoskop Setneg menjadi ini refleksi atas perjalanan pemerintahan selama satu tahun, sekaligus menjadi arsip informasi bagi masyarakat.





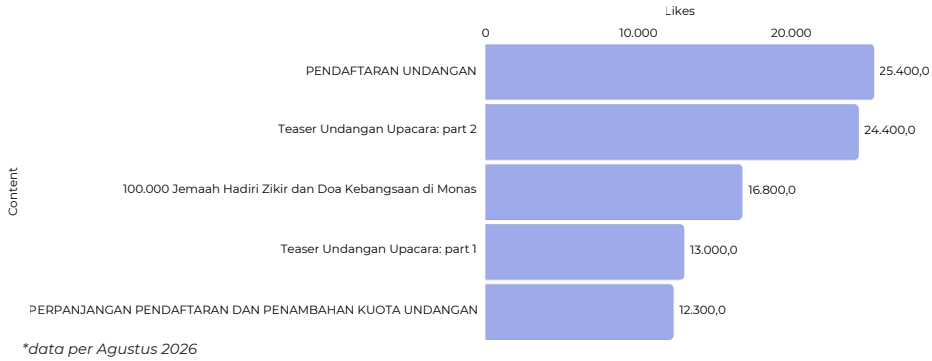
KONTEN KREATIF

Pertumbuhan Jumlah Followers



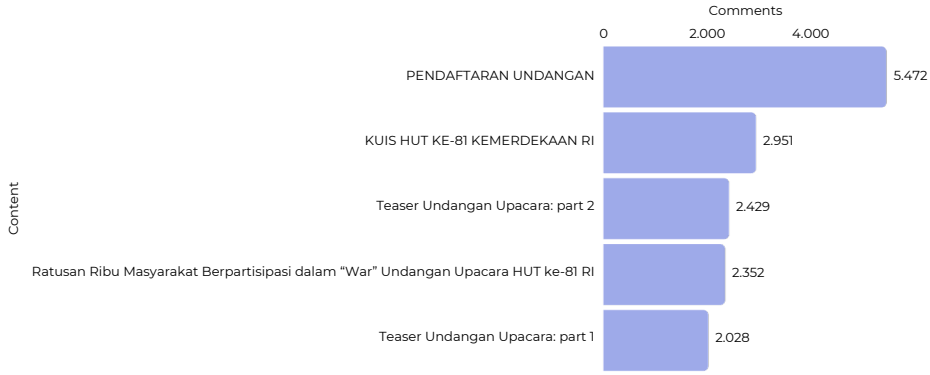
**data per Agustus 2026*

Performa Likes (Top Likes)



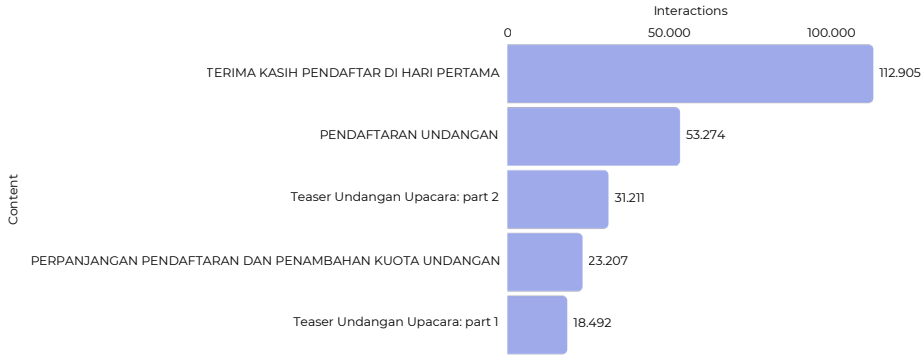
**data per Agustus 2026*

Performa Komentar (Top Comments)



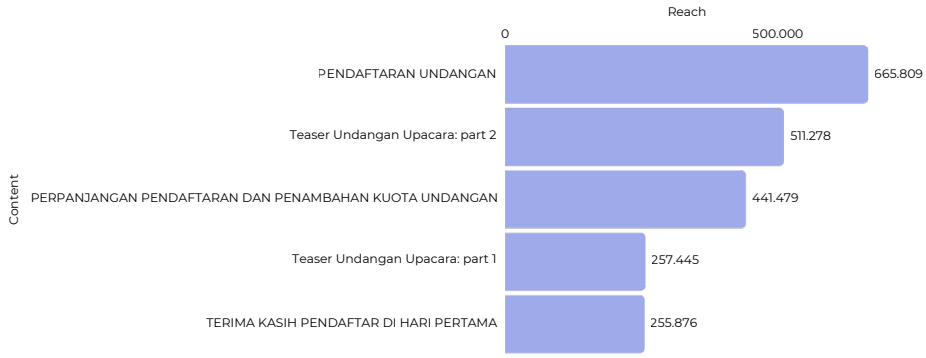
**data per Agustus 2026*

Performa Interaksi (Top Interactions)



**data per Agustus 2026*

Performa Jangkauan (Top Reach)



**data per Agustus 2026*

BAB VI

PENANGANAN AKSI UNJUK RASA



KEBEBASAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DALAM KORIDOR KONSTITUSI DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai konstitusi Indonesia secara tegas menjamin kebebasan setiap warga negara. Namun demikian, kebebasan tersebut bukanlah kebebasan yang bersifat mutlak, melainkan kebebasan yang bertanggung jawab dan dibatasi oleh hak-hak orang lain serta ketertiban umum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Salah satu bentuk kebebasan yang diatur oleh UUD 1945 adalah hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, atau yang dikenal sebagai unjuk rasa.

Hak ini diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, khususnya dalam Pasal 1 yang menyatakan bahwa "Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran secara lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku." Oleh karena itu, setiap elemen masyarakat yang hendak menyampaikan pendapat wajib melakukannya sesuai dengan ketentuan hukum agar pelaksanaannya tertib, damai, dan tidak mengganggu ketertiban umum. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 secara khusus mengatur bentuk dan tata cara penyampaian pendapat di muka umum, yang meliputi:

- Humas Kemensetneg
- Unjuk rasa
- Pawai
- Rapat umum
- Mimbar bebas



Adapun mekanisme pelaksanaannya meliputi:

- Pemberitahuan secara tertulis kepada Kepolisian oleh pihak yang bertanggung jawab, selambat-lambatnya 3 x 24 jam sebelum pelaksanaan kegiatan
- Surat pemberitahuan harus mencantumkan maksud dan tujuan kegiatan, lokasi dan rute, waktu dan durasi, bentuk kegiatan, nama penanggung jawab, serta jumlah peserta dan alat peraga yang akan digunakan.
- Setiap 100 peserta wajib memiliki 1–5 orang penanggung jawab.
- Setelah menerima pemberitahuan, Polri berkewajiban untuk:
    1. Memberikan tanda terima
    2. Berkoordinasi dengan penanggung jawab kegiatan
    3. Berkoordinasi dengan instansi tujuan aksi
    4. Menyiapkan pengamanan lokasi dan rute
- Jika aksi dibatalkan, maka pemberitahuan pembatalan wajib disampaikan secara tertulis paling lambat 24 jam sebelum kegiatan dimulai.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 juga mengatur bahwa peserta unjuk rasa yang melakukan pelanggaran hukum, seperti penganiayaan, pengeroyokan, perusakan fasilitas umum, hingga perbuatan yang menyebabkan korban jiwa, dapat dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menegaskan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak demokratis yang dijamin oleh negara, namun pelaksanaannya tetap harus dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak melanggar hukum. Untuk menjaga agar penyampaian pendapat tetap berada dalam koridor hukum, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 menekankan lima asas utama:

- Keseimbangan antara hak dan kewajiban
- Musyawarah dan mufakat
- Kepastian hukum dan keadilan
- Proporsionalitas
- Manfaat



Tahun 2025 menjadi tahun yang tak kalah penting dalam dinamika demokrasi Indonesia. Pasalnya, ini adalah periode awal pemerintahan baru yang lahir dari Pemilihan Umum Serentak 2024, di mana berbagai program dan kebijakan mulai dijalankan. Situasi ini turut memengaruhi frekuensi dan intensitas penyampaian aspirasi publik, baik yang bersifat dukungan maupun kritik, terhadap arah kebijakan pemerintah yang tengah berjalan.

Dalam konteks tersebut, Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) mencatat telah menangani 9 aksi unjuk rasa yang berlangsung di kawasan Istana Kepresidenan dan sekitarnya sepanjang tahun 2025. Aksi-aksi tersebut datang dari berbagai elemen masyarakat dengan membawa isu-isu strategis yang menjadi sorotan publik.

Setidaknya terdapat lima isu utama atau pokok-pokok substansi yang paling dominan disuarakan dalam unjuk rasa sepanjang tahun ini, yaitu:

Politik dan Keamanan

Aspirasi yang masuk mencakup penyampaian isu-isu strategis dari daerah serta tuntutan atas jaminan keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk penghentian praktik intimidasi oleh kelompok masyarakat tertentu.

- Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Utara, 12 September 2025
  Tuntutan: *Penyampaian aspirasi dan isu-isu strategis yang berkembang di daerah Sulawesi Utara*.
- Persatuan Perjuangan Rakyat Banten, 24 Oktober 2025
  Tuntutan: *Menjamin keamanan dan ketertiban, serta menghentikan segala bentuk intimidasi oleh Organisasi Masyarakat (Ormas) di Kampung Lapak Priok, Cilegon*.

Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)

Masyarakat menyuarakan perlunya kepastian hukum, perlindungan dari tekanan kelompok tertentu, serta jaminan keamanan dalam beraktivitas.

- Persatuan Perjuangan Rakyat Banten, 24 Oktober 2025
  Tuntutan: *Penghentian intimidasi dan penegakan jaminan keamanan bagi warga Kampung Lapak Priok, Cilegon*.

Ketenagakerjaan

Isu kesejahteraan pekerja, pengangkatan tenaga pendidik, perlindungan buruh, serta nasib pengemudi online menjadi sorotan utama sepanjang tahun.

- Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), 30 Desember 2025
  Tuntutan: *Perjuangan hak-hak buruh dan peningkatan kesejahteraan pekerja.*
- Pengurus Besar Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PBPGSI), 30 Oktober 2025
  Tuntutan: *Pemenuhan prioritas pengangkatan guru swasta menjadi PPPK/ASN, penyelesaian tunggakan inpassing 2011–2014, percepatan sertifikasi guru, dan penerbitan SK Inpassing bagi tenaga pendidik di sekolah dan madrasah swasta.*
- Gabungan Forum Urun Rembug Nasional Serikat Pekerja - Serikat Buruh dan Aliansi Pengemudi Online Bersatu, 10 September 2025
  Tuntutan: *Menyuarakan berbagai isu ketenagakerjaan dan kesejahteraan sosial, termasuk perlindungan bagi pengemudi online.*

Pertanahan dan Agraria

Konflik agraria dan tuntutan pemerataan akses lahan bagi petani menjadi isu yang mengemuka, terutama bertepatan dengan peringatan Hari Tani Nasional.

- Gabungan Serikat Petani Indonesia (SPI) dan sejumlah elemen masyarakat, 24 September 2025
  Tuntutan: *Reforma agraria untuk kedaulatan pangan, penolakan terhadap praktik perampasan tanah, serta pemerataan akses lahan bagi rakyat.*

Ketenagakerjaan

Aspirasi dari kalangan industri dan pelaku UMKM turut mewarnai dinamika penyampaian pendapat, terutama terkait regulasi sektoral dan keberlangsungan usaha.

- Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo), 12 November 2025
  Tuntutan: *Pembahasan mengenai aturan cukai hasil tembakau, regulasi kadar tar dan nikotin, serta kebijakan larangan penjualan rokok di radius 200 meter dari kawasan pendidikan.*
- Gabungan Forum Urun Rembug Nasional Serikat Pekerja - Serikat Buruh dan Aliansi Pengemudi Online Bersatu, 10 September 2025
  Tuntutan: *Isu-isu ekonomi dan kesejahteraan yang juga mencakup perlindungan bagi pelaku usaha kecil dan pengemudi online.*

Penanganan seluruh aspirasi dan aksi tersebut dilakukan oleh Kemensetneg secara koordinatif dan persuasif, bekerja sama dengan Polri, TNI, serta kementerian/lembaga teknis terkait. Proses penyerapan aspirasi dilaksanakan melalui mekanisme audiensi di Ruang Aspirasi Kemensetneg dengan mengedepankan prinsip keterbukaan, dialog yang konstruktif, serta pelayanan yang responsif. Hal ini sejalan dengan komitmen Kemensetneg sebagai institusi yang menjembatani komunikasi antara rakyat dan Presiden, sekaligus memastikan bahwa penyampaian pendapat berlangsung secara tertib, damai, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.









BAB VII

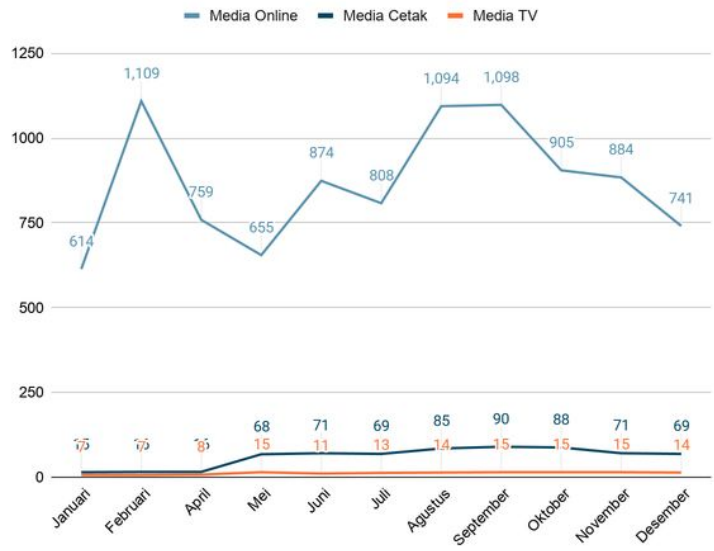
MONITORING DAN ANALISIS MEDIA



Foto: Digital Bugu pada Pexel

Tren Ekspos Pemberitaan

Penanganan seluruh aspirasi dan aksi tersebut dilakukan oleh Kemensetneg secara koordinatif dan persuasif, bekerja sama dengan Polri, TNI, serta kementerian/lembaga teknis terkait. Proses penyerapan aspirasi dilaksanakan melalui mekanisme audiensi di Ruang Aspirasi Kemensetneg dengan mengedepankan prinsip keterbukaan, dialog yang konstruktif, serta pelayanan yang responsif. Hal ini sejalan dengan komitmen Kemensetneg sebagai institusi yang menjembatani komunikasi antara rakyat dan Presiden, sekaligus memastikan bahwa penyampaian pendapat berlangsung secara tertib, damai, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

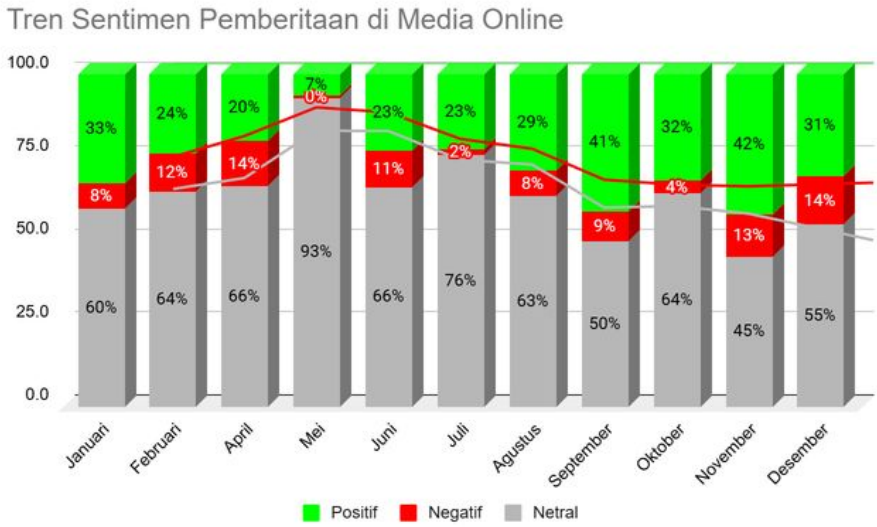


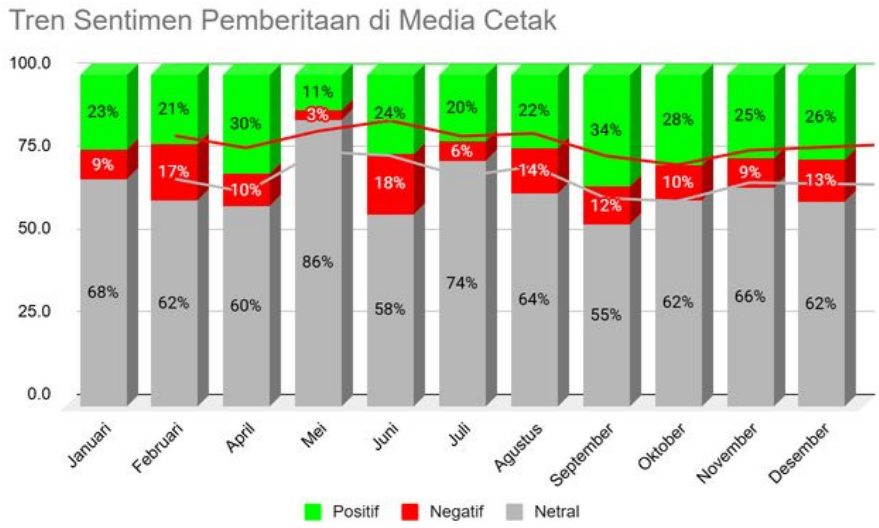
Isu yang Mendominasi Pemberitaan

Bulan	Isu Dominan		
	Media Online	Media Cetak	Media TV
Januari	• Agenda Kepresidenan (22%) • Perubahan PPDB menjadi SPMB (16%) • Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati (16%)	• Agenda Kepresidenan (26%) • Penghematan Perjalanan Dinas untuk Program MBG • (26%) • Perubahan PPDB menjadi SPMB • (13%)	• Penghematan Perjalanan Dinas untuk Program MBG (35%) • Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati (21%) • Perubahan PPDB menjadi SPMB (7%)
Februari	• Retret Kepala Daerah (11%) • Polemik Efisiensi Anggaran (11%) • Gerakan Indonesia Gelap (11%)	• Polemik Efisiensi Anggaran (19%) • Pelaksanaan MBG (19%) • Pembangunan IKN (15%)	• Gerakan Indonesia Gelap (26%) • Polemik Efisiensi Anggaran (22%) • Retret Kepala Daerah (20%)

Bulan	Isu Dominan		
	Media Online	Media Cetak	Media TV
April	• Pengunduran Diri Kepala PCO (18%) • Pengelolaan BPI Danantara (13%) • Pertemuan Prabowo-Megawati (12%)	• Pengunduran Diri Kepala PCO (18%) • Pengelolaan BPI Danantara (17%) • Perang Tarif Trump (12%)	• Narasi Matahari Kembar (26%) • Isu Reshuffle (19%) • Pertemuan Prabowo-Megawati (16%) • Usulan Soeharto Pahlawan Nasional (16%)
Mei	• Hari Buruh Internasional (19%) • Hasan Nasbi Lanjut Pimpin PCO (17%) • Danantara (11%)	• Hasan Nasbi Lanjut Pimpin PCO (23%) • Pertemuan Prabowo dan Megawati (12%) • Penertiban Premanisme (12%)	• Penertiban Premanisme dan Ormas (31%) • Hari Buruh (18%) • Kunjungan Presiden Perancis (12%)
Juni	• Sengketa Pulau Aceh-Sumut (39%) • Tambang Raja Ampat (22%) • Isu Reshuffle (12%)	• Sengketa Pulau Aceh-Sumut (46%) • Tambang Raja Ampat (14%) • Isu Reshuffle (9%)	• Agenda Internasional Prabowo (20%) • Gaji Hakim (17%) • Tambang Raja Ampat (14%)
Juli	• Logo HUT ke-80 RI (29%) • Pembangunan IKN (11%) • Tarif Resiprokal AS (9%)	• Pembangunan IKN (25%) • Transfer Data US-RI (18%) • Tarif Resiprokal AS (12%)	• Tarif Trump (18%) • Pembangunan IKN (15%) • Konflik Thailand Kamboja (13%)
Agustus	• HUT RI ke-80 (36%) • Kasus Immanuel Ebenezer (17%) • Abolisi dan Amnesti (10%)	• Kasus Immanuel Ebenezer (22%) • HUT RI ke-80 (20%) • Tunjangan DPR (12%)	• Hari Kemerdekaan RI (32%) • Aksi Demonstrasi (18%) • Rangkaian Aksi Demo (10%)
September	• Reshuffle Kabinet Merah Putih (46%) • Makan Bergizi Gratis (13%) • Reformasi Polri (11%)	• Reshuffle Kabinet Merah Putih (41%) • Makan Bergizi Gratis (15%) • Reformasi Polri (15%)	• Reshuffle Kabinet (47%) • MBG (23%) • Rapat Terbatas (6%)
Oktober	• Makan Bergizi Gratis (23%) • Ditjen Pesantren (17%) • Pertumbuhan Ekonomi (15%)	• Makan Bergizi Gratis (34%) • Setahun Prabowo-Gibran (12%) • Ditjen Pesantren (10%)	• Makan Bergizi Gratis (20%) • Rapat Terbatas (17%) • Ditjen Pesantren (16%)
November	• Komisi Percepatan Reformasi Polri (23%) • Kasus Ex Direktur ASDP (23%) • Rapat Terbatas (16%)	• Kasus Ex Direktur ASDP (21%) • Komisi Percepatan Reformasi Polri (20%) • Rapat Terbatas (16%)	• Kasus Ex Direktur ASDP (29%) • Rapat Terbatas (34%) • Pahlawan Nasional (20%)
Desember	• Bencana Alam Sumatera (53%) • Reformasi Polri (16%) • SEA Games 2025 (5%)	• Bencana Alam Sumatera (52%) • Reformasi Polri (15%) • Tahun Baru 2026 (6%)	• Bencana Alam di Sumatera (82%) • Ekonomi (5%) • Tahun Baru (1%)

Tren Sentimen Pemberitaan





Isu yang Mendorong Sentimen

Bulan	Isu Sentimen		
	Positif	Netral	Negatif
Januari	• Penerbitan Inpres No 1 Tahun 2025 (Penghematan Rp306,69 T untuk Makan Bergizi Gratis) • Revitalisasi Wisma Atlet Kemayoran • Bantuan untuk Kemiskinan Ekstrim • Pemanfaatan DTSEN untuk Atasi Kemiskinan • Regulasi Swasembada Pangan	• Kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke India untuk memenuhi undangan PM Narendra Modi (menghadiri Hari Republik India ke-76 dan pertemuan bilateral), didampingi Wapres Gibran & Menhan Sjafrie • Persetujuan perubahan sistem penerimaan murid baru (SPMB) menggantikan PPDB (penghapusan zonasi dengan 4 jalur: Domisili berdasarkan jarak, Afirmasi, Mutasi, dan Prestasi) yang akan diterapkan mulai Maret 2025 • Penjelasan Mensesneg Prasetyo Hadi terkait penjadwalan pertemuan Presiden Prabowo dan Megawati Soekarnoputri untuk kepentingan bangsa, serta pengiriman karangan bunga ucapan ulang tahun ke-78 kepada Megawati	• Sorotan dan polemik terkait penggunaan pelat mobil dinas RI 36 oleh Raffi Ahmad • Potensi Kemunduran Pelantikan Kepala Daerah
Februari	• Peresmian BPI Danantara sebagai agen pembangunan ekonomi • Peluncuran Bank Emas di Pegadaian (target PDB Rp245 T & 1,8 juta lapangan kerja) • Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis • Pelantikan Kepala Daerah • THR dan Gaji ke-13 ASN	• Pemerintah jelaskan beasiswa dan tunjangan kinerja tidak terkena efisiensi anggaran • Mensesneg menemui langsung demonstran aksi ‘Indonesia Gelap’ dan menandatangani draf tuntutan sebagai bentuk komitmen negara • Penjelasan Mensesneg terkait pendanaan retret kepala daerah menggunakan anggaran negara (bukan dana pribadi) serta klarifikasi kepemilikan PT Lembah Tidar oleh akademi militer	• Polemik retret kepala daerah • Polemik efisiensi anggaran dan gelombang aksi ‘Indonesia Gelap’ menuntut evaluasi yang berdampak pada sektor pendidikan • Polemik Kelangkaan LPG • Polemik Pengangkatan Stafsus Deddy Corbuzier
April	• Program Sekolah Rakyat • Jadwal Pengangkatan ASN • Wacana Pembentukan Satgas PHK • Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis • THR dan Gaji ke-13 ASN	• Pengunduran diri Hasan Nasbi sebagai Kepala PCO dan penunjukan Mensesneg Prasetyo Hadi sebagai Jubir Presiden • Wacana pengalihan pengelolaan aset GBK ke Danantara • Pertemuan Presiden Prabowo dan Megawati Soekarnoputri beserta klarifikasi Mensesneg bahwa pertemuan tidak membahas koalisi • Wacana kehadiran Presiden Prabowo pada peringatan Hari Buruh • Pemakaman Paus Fransiskus • Isu *Reshuffle* Kabinet • Usulan Daerah Istimewa Solo • Usulan Soeharto Pahlawan Nasional	• Gugatan terhadap Perpres No 82 Tahun 2024 tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan yang tetap berlanjut meski ada pengunduran diri Kepala PCO • Gugatan terhadap UU TNI yang dinilai tidak transparan • Perang Tarif Trump • Narasi Matahari Kembar • Dugaan Ijazah Palsu Jokowi

Bulan	Isu Sentimen		
	Positif	Netral	Negatif
Mei	• Koperasi Desa Merah Putih • Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis • Program Sekolah Rakyat	• Kehadiran Presiden Prabowo dan Mensesneg Prasetyo Hadi pada aksi Hari Buruh (May Day) di Monas serta komitmen menindaklanjuti enam tuntutan buruh • Wacana pengalihan pengelolaan aset GBK, Hotel Sultan, dan TMII ke bawah naungan Danantara atas arahan Presiden • Batalnya pengunduran diri Hasan Nasbi sebagai Kepala PCO setelah permintaannya ditolak Presiden disertai pesan khusus • Wacana Penertiban Premanisme • KTT ASEAN	• Kritik Koalisi Masyarakat Sipil terkait Perpres 66/2025 (Perlindungan Jaksa) yang dinilai tidak urgen • Insiden Listrik Mati di Bali
Juni	• Bantuan Sapi Qurban Presiden Prabowo • Swasembada Energi • Strategi Ekonomi Indonesia • Program Sekolah Rakyat • Pelaksanaan MBG (Makan Bergizi Gratis) • Upacara Hari Lahir Pancasila	• Sengketa 4 pulau antara Aceh dan Sumut hingga akhirnya dikembalikan ke Aceh • Pencabutan IUP 4 perusahaan tambang di Raja Ampat • Wacana/Isu Reshuffle Kabinet menyusul instruksi tegas Presiden pada Upacara Hari Lahir Pancasila • Kunjungan Ahmad Sufmi Dasco dan Prasetyo Hadi ke rumah Megawati • Pembahasan RUU KUHAP	• Anggaran Mobil Dinas Eselon I nyaris Rp1 Miliar per unit yang dinilai tidak efisien • Protes publik atas penanganan tambang di Raja Ampat yang sempat dinilai lambat ("No Viral No Justice") serta polemik pengecualian izin PT GAG • Konflik Israel • Pembubaran Saber Pungli
Juli	• Pemangkasan tarif ekspor Indonesia ke Amerika Serikat dari 32% menjadi 19% hasil pembicaraan Presiden Prabowo dan Donald Trump • Program Sekolah Rakyat • Ketahanan Pangan	• Peresmian peluncuran logo dan tema resmi HUT ke-80 RI oleh Presiden Prabowo • Penjelasan Mensesneg terkait target percepatan pembangunan IKN (rampung 3 tahun) • Persiapan Upacara HUT RI • Pemisahan Pemilu • Isu Gibran ditugaskan di Papua • Transfer Data US-RI	• Temuan PPATK mengenai 571.410 NIK penerima bansos yang terindikasi pemain judi online
Agustus	• Pemberian abolisi untuk Thomas Trikasih Lembong dan amnesti untuk Hasto Kristiyanto yang disetujui DPR • Penganugerahan Tanda Kehormatan • Naturalisasi Atlet • Program Sekolah Rakyat	• Penyelenggaraan Rangkaian Peringatan HUT ke-80 RI (termasuk pelantikan Paskibraka, upacara resmi di Istana Merdeka yang dipusatkan tanggal 17 Agustus, hingga penyelenggaraan pesta rakyat • Presiden Prabowo mendukung penuh proses hukum di KPK • Pembentukan Kementerian Haji • Munaslub Golkar • Isu Bendera One Piece	• Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK yang menjerat Wamennaker Immanuel Ebenezer (Noel) serta kritik publik terhadap kompetensi kabinet • Aksi unjuk rasa di Pati terkait kenaikan PBB • Kasus Ojol tewas • Polemik Tunjangan DPR

Bulan	Isu Sentimen		
	Positif	Netral	Negatif
September	• Pembentukan Tim Komite Reformasi Polri oleh pemerintah (melibatkan mantan Kapolri dan Mahfud MD) • Keikutsertaan dan pidato Indonesia pada KTT PBB di New York • Respons cepat pemerintah dan digelarnya rapat terbatas oleh Presiden untuk mengevaluasi program MBG • Kenaikan Gaji PNS • Capaian Prabowo di Bioskop	• Reshuffle Kabinet Merah Putih jilid baru berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 86P Tahun 2025 yang melibatkan pergantian 5 pimpinan kementerian • Kunjungan Presiden ke Tiongkok • Audiensi BEM SI • Seputar perkembangan IKN • Wacana Kementerian BUMN Dibubarkan	• Kasus keracunan massal yang terjadi berulang kali akibat konsumsi makanan dari program MBG • Kritik tajam masyarakat terhadap arogansi pejabat di jalan raya yang memicu kampanye "Stop Strobo" • Pencabutan ID Pers jurnalis CNN di Istana yang menuai protes keras dari berbagai pihak
Oktober	• Peluncuran BLT Kesejahteraan Rakyat senilai Rp300 ribu bagi 35 juta KPM dari hasil pengalihan/ efisiensi anggaran nonproduktif • Restu pembentukan Ditjen Pesantren di bawah Kementerian Agama sebagai komitmen memperkuat ekosistem pendidikan pesantren • Pertemuan dengan Jokowi	• Rapat terbatas Presiden Prabowo di Kertanegara untuk pengambilan keputusan kebijakan ekonomi • Penyusunan Perpres tata kelola program MBG yang memerlukan proses dan kehati-hatian agar tidak tergesa-gesa • Peringatan Setahun Pemerintahan Prabowo - Gibran • Lanjutan Reformasi Polri • Regulasi Ojek Online	• Kasus keracunan berulang dan pelanggaran dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) • Polemik Hotel Sultan yang menggunakan aset/hotel negara tanpa membayar kewajiban royalti • Polemik utang dan keuangan proyek Kereta Cepat • Tunggakan BPJS
November	• Pemberian rehabilitasi oleh Presiden Prabowo kepada tiga terpidana kasus dugaan korupsi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) atas usulan DPR dan pertimbangan Menkum • Penganugerahan Pahlawan Nasional • Pembangunan Infrastruktur	• Rencana pembentukan Tim/ Komisi Percepatan Reformasi Polri oleh Presiden untuk perbaikan institusi (publik diminta menunggu keputusan resmi) • Rapat Terbatas Presiden Prabowo (membahas ledakan di SMA 72, penanggulangan tambang ilegal, dan penyerapan dana transfer ke daerah) • Pengelolaan Aset GBK • Kunjungan kenegaraan Raja Yordania ke Indonesia • Pengaturan Anggaran Belanja	• Kendala dan evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) • Penanganan dampak Bencana di Sumatera
Desember	• Penentuan kenaikan bonus bagi peraih medali emas SEA Games 2025 menjadi Rp1 miliar oleh pemerintah (segera disahkan oleh Menpora dan Mensesneg) • Kebijakan Asuransi BMN (Barang Milik Negara) • Pertumbuhan Ekonomi	• Kunjungan langsung Presiden Prabowo dan Mensesneg Prasetyo Hadi ke lokasi bencana alam di Sumatera untuk memastikan pemulihan • Pertemuan antara Kompolnas dan Komisi Percepatan Reformasi Polri di gedung Kemensetneg untuk memperkuat agenda reformasi kepolisian • Penyelenggaraan Rapat Terbatas Presiden Prabowo dan agenda menyambut Tahun Baru 2026 • Pembahasan UU KUHAP	• Sengketa lahan Hotel Sultan • Tekanan publik untuk menaikkan status bencana alam di Sumatera menjadi bencana nasional • Dugaan penyalahgunaan dan sabotase dalam upaya penanggulangan bencana alam • Komisi Percepatan Reformasi Polri dinilai tidak akan berdampak signifikan • Kebakaran Gedung Terra Drone • Polemik internal konflik PBNU • Evaluasi lanjutan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Top Person

Media Online

Bulan	Top Person	Jumlah Ekspos
Januari	Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto	1279
	Mendikdasmen, Abdul Mu'ti	1189
	Mensesneg, Prasetyo Hadi	705
Februari	Mensesneg, Prasetyo Hadi	3890
	Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto	3490
	Menteri BUMN, Erick Thohir	874
April	Mensesneg, Prasetyo Hadi	5187
	Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto	3410
	CEO BPI Danantara, Rosan P Roeslani	1345
Mei	Mensesneg, Prasetyo Hadi	2016
	Presiden RI, Prabowo Subianto	1463
	Kepala PCO, Hasan Nasbi	568
Juni	Mensesneg, Prasetyo Hadi	2152
	Presiden RI, Prabowo Subianto	1180
	Ketua DPR RI, Ahmad Sufmi Dasco	1093
Juli	Mensesneg, Prasetyo Hadi	1842
	Presiden RI, Prabowo Subianto	1396
	Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming	488
Agustus	Mensesneg, Prasetyo Hadi	3418
	Presiden RI, Prabowo Subianto	2189
	Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad	917
September	Mensesneg, Prasetyo Hadi	3905
	Presiden RI, Prabowo Subianto	1536
	Eks Menteri Keuangan, Sri Mulyani	1142
Oktober	Mensesneg, Prasetyo Hadi	4464
	Presiden RI, Prabowo Subianto	2068
	Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi	942
November	Mensesneg, Prasetyo Hadi	2498
	Presiden RI, Prabowo Subianto	1270
	Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad	928
Desember	Mensesneg, Prasetyo Hadi	1916
	Presiden RI, Prabowo Subianto	1548
	Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya	675

Media Cetak

Bulan	Top Person	Jumlah Ekspos
Januari	Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto	30
	Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo	14
	Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati	14
Februari	Mensesneg, Prasetyo Hadi	82
	Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto	74
	Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati	32
April	Mensesneg, Prasetyo Hadi	72
	Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto	66
	CEO BPI Danantara, Rosan P Roeslani	21
Mei	Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto	97
	Mensesneg, Prasetyo Hadi	79
	Kepala PCO, Hasan Nasbi	37
Juni	Mensesneg, Prasetyo Hadi	105
	Presiden RI, Prabowo Subianto	93
	Mendagri, Tito Karnavian	56
Juli	Mensesneg, Prasetyo Hadi	106
	Presiden RI, Prabowo Subianto	92
	Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming	38
Agustus	Mensesneg, Prasetyo Hadi	331
	Presiden RI, Prabowo Subianto	272
	Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad	59
September	Mensesneg, Prasetyo Hadi	319
	Presiden RI, Prabowo Subianto	287
	Eks Menteri Keuangan, Sri Mulyani	80
Oktober	Mensesneg, Prasetyo Hadi	235
	Presiden RI, Prabowo Subianto	220
	Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi	60
November	Mensesneg, Prasetyo Hadi	142
	Presiden RI, Prabowo Subianto	123
	Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad	50
Desember	Mensesneg, Prasetyo Hadi	106
	Presiden RI, Prabowo Subianto	101
	Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya	36

Ekspos Perundang-undangan

Bulan	Produk Perundang-Undangan	Jumlah Pemberitaan
Januari	Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja	73
	Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan • Perpres Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2024 tentang Neraca Komoditas • Perpres Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi • Inpres Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pendayagunaan Penyuluh Pertanian dalam Rangka Percepatan Swasembada Pangan	23
Februari	Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara	196
	RUU Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	164
	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara	149
	Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara	43
April	Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	1.418
	Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan 80000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) di seluruh Indonesia	521
	Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2025 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi	241
	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia	12

Ekspos Perundang-undangan

Bulan	Produk Perundang-Undangan	Jumlah Pemberitaan
Mei	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang Pelindungan Negara terhadap Jaksa dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Republik Indonesia	158
	Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	12
	Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/566/V/2025 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di	5
	Lingkungan TNI Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34	9
	Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Keputusan Presiden Nomor 37/TNI/Tahun 2025 tentang Pemberhentian dengan Hormat Perwira Tinggi TNI atas Nama Letjen TNI Djaka Budhi	3
Juni	Utama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik	13
	Negara Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha	82
	Berbasis Risiko Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan	19
Juli	Impor Undang-Undang Nomor 4-13 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Kabupaten/Kota Baru	5
	(Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penanganan Secara Khusus dan	8
	Pemberian Penghargaan bagi Saksi Pelaku Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 671/KPTS/M/2025 tentang Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kementerian	1
Agustus	Pekerjaan Umum Tahun 2025-2029 Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026	1.426

Bulan	Produk Perundang-Undangan	Jumlah Pemberitaan
September	Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025	1.567
	Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	128
	Keputusan Presiden Nomor 96/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024–2029	49
Oktober	Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025	205
	Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional	123
	Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan	117
November	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	2.174
	Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2025 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi yang Bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji dan Nilai Manfaat	1.122
	Keputusan Presiden Nomor 116/TK Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional	662
	Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah untuk Mendukung Swasembada Pangan dan Energi	140
Desember	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	822
	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana	182
	Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan	291

BAB VII

PENGHARGAAN



PENGHARGAAN YANG DIRAIH OLEH BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT TAHUN 2025

Anugerah Media Humas (AMH) 2025

Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) meraih Peringkat II Kategori Website Kelompok Kementerian/Lembaga, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam ajang Anugerah Media Humas (AMH) 2025 yang digelar oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) di Jakarta pada Rabu (12/11/2025). Kemensetneg bersanding dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kemkomdigi yang masing-masing menjadi Peringkat I dan Peringkat III.



Badan Publik Informatif pada Anugerah KIP 2025

Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) meraih predikat "Badan Publik Informatif" dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025. Penghargaan tersebut diserahkan pada acara yang berlangsung di Gedung Bidakara, Jakarta, Senin (15/12/2025), dengan capaian nilai 94,39 untuk kategori kementerian.



BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA